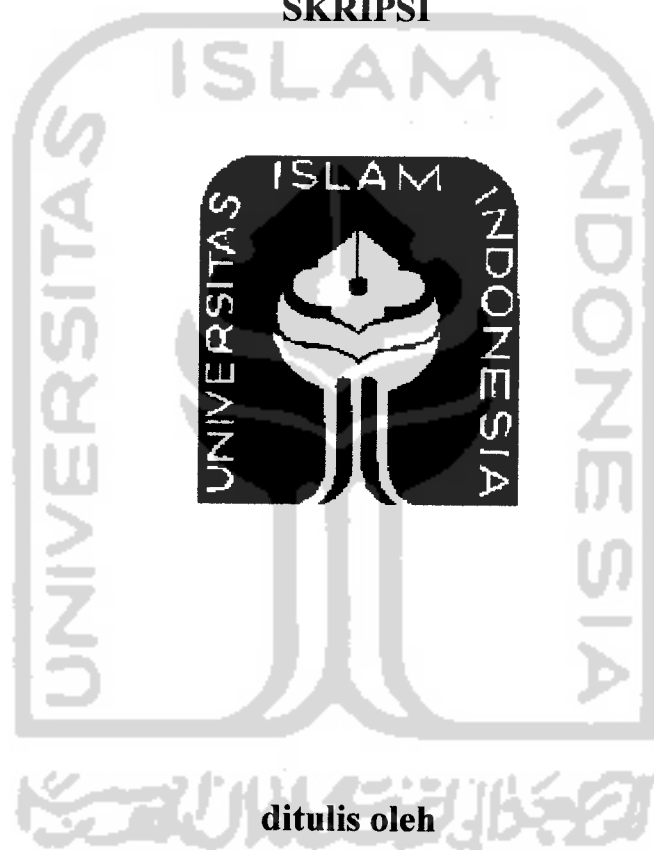


**EKSPLORASI KEBUTUHAN STAKEHOLDERS  
TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN AUDIT  
PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**



**ditulis oleh**

**Nama : Riang Adistyningtyas  
Nomor Mahasiswa : 04312414  
Program Studi : Akuntansi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA  
2008**

**EKSPLORASI KEBUTUHAN STAKEHOLDERS  
TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN AUDIT  
PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**

**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna  
memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia**



oleh

**Nama : Riang Adistyaningtyas  
Nomor Mahasiswa : 04312414  
Program Studi : Akuntansi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA  
2008**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, April 2008

Penulis,

Riang Adistyningtyas

**EKSPLORASI KEBUTUHAN STAKEHOLDERS  
TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN AUDIT  
PEMERINTAH DAERAH**



**oleh**  
**Nama : Riang Adistyningtyas**  
**Nomor Mahasiswa : 04312414**  
**Program Studi : Akuntansi**

**Yogyakarta, 15 April 2008**  
**Telah disetujui dan disahkan oleh**  
**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is written over the text of the supervisor's name.

**Johan Arifin, SE, M.Si**

# BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

## SKRIPSI BERJUDUL

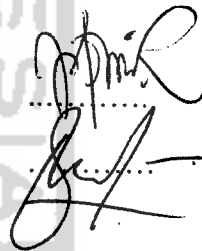
### **Eksplorasi Kebutuhan Stakeholders Terhadap Infoemasi Dalam Laporan Audit Pemerintah Daerah**

Disusun Oleh: RIANG ADISTYANINGTYAS  
Nomor Mahasiswa: 04312414

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS  
Pada tanggal : 23 Mei 2008

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si

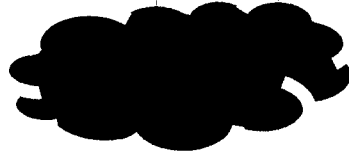
Penguji : Drs. Muqodim, MBA, Ak



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D



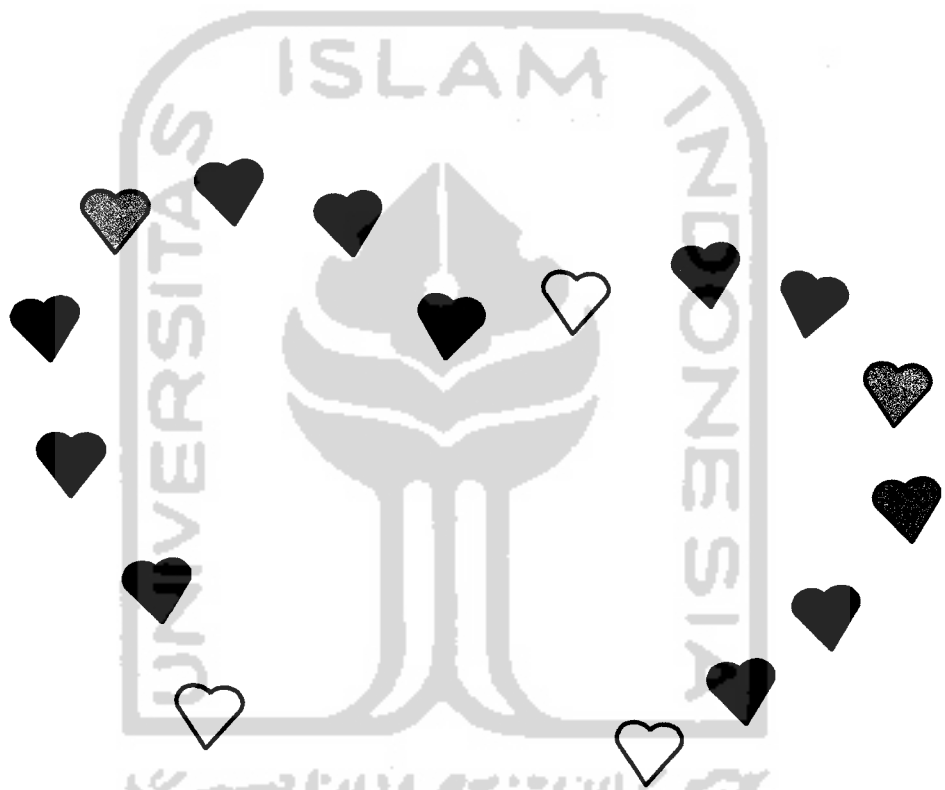
“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulaz”

“Jangan biarkan orang lain lebih tahu banyak tentang dirimu. Bekerjalah dengan senang hati dan dengan ketenangan jiwa, yang membuat kamu menyadari, bahwa muatan pikiran yang benar dan usaha yang benar akan mendatangkan hasil yang benar”

“untuk menciptakan sesuatu, harus melakukan sesuatu”

لَا يَجِدُكَ إِلَّا الْفَتَى الْوَعْدَى

## Persembahan



*Skripsi ini ADIST persembahkan untuk:  
Mama & Babe-Ku tersayang & tercinta,  
Kakak-KakakKu tersayang, Mas Tinto & Mas Oq  
PenyemangatKu, Aditya Yudistira*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EKSPLORASI KEBUTUHAN STAKEHOLDERS TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN AUDIT PEMERINTAH DAERAH”** dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan Allah SWT dan juga peran dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Asma'i Ishak, M.Bus, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi atas izin menyusun skripsi ini.
2. Bapak Joko Susilo selaku Dosen Program Diploma 3, terima kasih atas referesi penelitian, bantuan dan masukannya.
3. Bapak Johan Arifin, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi atas kesempatan, bantuan dan bimbingan yang diberikan.
4. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., MforA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan terhadap perkembangan studi.
5. Kedua orang tuaku tercinta, babe & mami terimakasih atas doa, nasehat, perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil.
6. Buat Mas Tinto & Mas Oq terima kasih atas doa & semangatnya, semoga kita bertiga cepat sukses yach.. Amien.



7. Aditya Yudistira, Cwity-Ku, makasiiiihih banget buat dukungannya, doa'nya, perhatiannya, waktunya & semuanya. Makasih dah mau ngaterin bimbingan setiap saat walaupun panas & hujan. Yang pasti makasih dah sabar banget ma aku.
8. Keluarga Bapak Fatkhur Rochman di Nganjuk (Ayah & Mama – Cwity; Rika), terimakasih atas dukungan & doanya.
9. Keluarga Bapak Suhartono di Pati; Bapak, ibu, mba Rina & Randi, terimakasih atas perhatian, dukungan & doanya.
10. Terima kasih buat sahabat-sahabatku: anggota Trio Kwek-kwek,, Eq & As3 beserta pasangan masing-masing (Mas Danang & Bang Danie). 'Dah 4 tahun qt bareng, seru banget, lucu, asyik.. Ayo cepat selesaiin skripsinya.
11. Terima kasih buat anggota kosku dan yang selalu memberikan dukungan: Desi, adek sepupuku chayo yang semangat yach kuliahnya, jangan lupa rajin belajar. Mbak Wigi makasih selalu kasih aku masukan. Mba Putri, ayo semangat buruan lulus. Mba Ria, makasih buat bantuannya & masukannya. Mbak No'e thanks doa'nya & masukannya. Mbak Dinar makasih yach buat info2 yang berguna banget buat skripsiku. Mbak Nafi, thanks buat smua.
12. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih dirasakan belum sempurna, untuk itu penulis memohon kritik dan saran untuk perbaikan dikemudian hari. Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan Skripsi.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Berita Acara Ujian .....	v
Abstrak .....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
 <b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Karakteristik dan Pengertian Sektor Publik .....	7
2.1.2 Teori Agensi.....	9
2.1.3 Akuntabilitas .....	10
2.1.4 Pengauditan dalam Sektor Publik .....	13
2.1.5 Persepsi/Penilaian dan Kebutuhan/Harapan .....	17

2.1.6	Pemakai Laporan Keuangan Auditan Sektor Publik dan Kepentingannya .....	19
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu.....	20
2.3	Pengajuan Hipotesis.....	22

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Lokasi Penelitian.....	23
3.2	Populasi dan Sampel.....	23
3.2.1	Populasi.....	23
3.2.2	Sampel.....	24
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	24
3.3.1	Sumber Data.....	24
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	25
3.4	Alat Analisis Data.....	27
3.4.1	Uji Validitas.....	27
3.4.2	Uji Reliabilitas.....	29
3.4.3	Uji Rata-rata Penilaian <i>Stakeholders</i> .....	30
3.4.4	Uji Korelasi.....	30
3.4.5	Uji Perangkingan Rata-rata Kebutuhan <i>Stakeholders</i> .....	31
3.4.6	Uji Binomial.....	31

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

4.1	Uji Kualitas Data.....	34
4.1.1	Uji Validitas.....	35
4.1.2	Uji Reliabilitas.....	35
4.2	Identifikasi Responden.....	36
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden.....	37
4.2.2	Domisili Respdnen.....	37
4.2.3	Tingkat Pendidikan Responden.....	38
4.2.4	Status Responden.....	39

4.2.5	Masa Kerja.....	40
4.3	Hasil Rata-rata Penilaian <i>Stakeholders</i> pada Laporan Audit Pemerintah Daerah Karisidenan Banyumas.....	41
4.4	Uji Korelasi.....	44
4.5	Hasil Uji Perangkingan Rata-rata Kebutuhan <i>Stakeholders</i> .....	47
4.6	Uji Binomial.....	49
4.7	Pembahasan dan Implikasi Manajerial .....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Saran.....	55
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	56
	<b>Daftar Pustaka</b> .....	57
	<b>Lampiran</b> .....	59

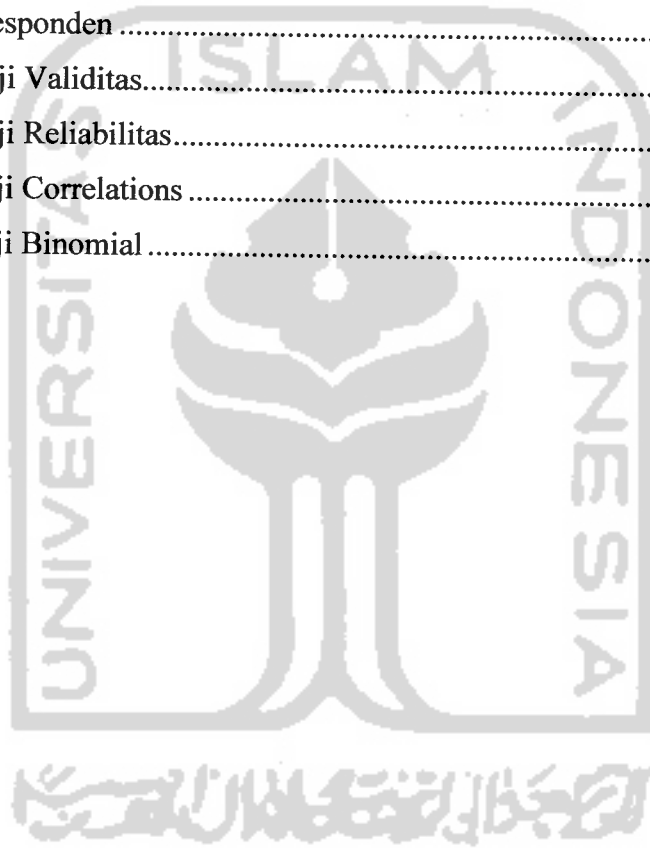


## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Hasil Penyebaran Kuisisioner.....	34
4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur Responden .....	37
4.3 Domisili Responden.....	38
4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Status.....	39
4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	40
4.7 Analisis Deskriptif Terhadap Persepsi <i>Stakeholders</i> terhadap Informasi Laporan Audit Pemerintah Daerah .....	41
4.8 Hasil Uji Korelasi .....	45
4.9 Hasil Perangkingan Kebutuhan <i>Stakeholders</i> .....	47
4.10 Uji Binomial.....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
I Surat Permohonan Ijin Penelitian .....	59
II Kuesioner Penelitian .....	60
III Rekapitulasi Data Penelitian .....	68
IV Data Responden .....	78
V Hasil Uji Validitas .....	80
VI Hasil Uji Reliabilitas .....	85
VII Hasil Uji Correlations .....	86
VIII Hasil Uji Binomial .....	87



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi *stakeholders* terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat memenuhi kebutuhan mereka akan informasi audit yang telah dilakukan serta untuk mengidentifikasi kebutuhan *stakeholders* akan informasi audit pemerintah daerah terkait dengan proses dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hipotesis penelitian ini adalah laporan audit pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi-informasi hasil audit keuangan, audit kepatuhan dan audit kinerja pemerintah daerah.

Subyek dalam penelitian ini adalah *stakeholders* pemerintah daerah, meliputi pembayar pajak, pemilih, perbankan pemerintah daerah, perbankan swasta, badan pengamat/LSM, personel pendidik, pegawai pemerintah, dan partai politik. Pengumpulan data kuisisioner dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan responden di Karisidenan Banyumas. Metode statistik yang digunakan adalah uji rata-rata instrumen, uji korelasi, uji perangkungan rata-rata dan uji binomial.

Hasil uji rata-rata instrumen dan uji korelasi menunjukkan bahwa informasi dalam laporan audit pemerintah daerah telah memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Ketiga jenis uji korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan positif dengan koefisien korelasi antara (0,162 – 0,481). Hasil uji perangkungan rata-rata instrumen menunjukkan pentingnya semua informasi dalam audit keuangan, audit kepatuhan dan audit kinerja. Sedang hasil uji binomial menunjukkan bahwa pentingnya informasi tersebut bukan semata karena sampel data tetapi memang karena informasi itu sendiri sangat penting untuk disajikan.

Kata kunci: *Eksplorasi, Teori Agensi, Akuntabilitas, Laporan Audit Pemerintah Daerah.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Pada era reformasi sekarang ini, pemerintah daerah semakin dituntut untuk membangun adanya transparansi di dalam setiap kebijakannya. Dengan adanya reformasi di dalam sistem pemerintahan, pemerintah pusat melakukan berbagai perubahan yang antara lain berupa penerbitan Peraturan Pemerintah yakni PP 105 tahun 2000 yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Kepmendagri 29/2002 dan KMK 308/2002 yang memberikan kemungkinan pemerintah daerah untuk menghasilkan pelaporan keuangan



tambahan seperti laporan surplus defisit dan laporan perubahan ekuitas (aktiva netto), serta menerbitkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 yang mengatur tentang upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Colin *et. al.* (1991) dalam Susilo (2006) dalam penelitiannya mengenai akses terhadap laporan keuangan pemerintah, menemukan tidak adanya bukti bahwa pihak eksternal dapat mengakses informasi keuangan pemerintah. Dapat diartikan disini, laporan keuangan pemerintah masih bersifat tertutup dan privat. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya auditor independen dalam sector publik semakin tinggi dirasakan oleh para pengguna laporan keuangan sektor publik. Tayyib (1994) dalam Susilo (2006) memperjelas permasalahan dengan hasil penelitiannya yang membuktikan hanya konsultan dan auditor saja yang tidak memiliki keterbatasan akses terhadap laporan keuangan pemerintah dibandingkan masyarakat sebagai pembayar pajak.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan laporan keuangan auditan khususnya laporan audit sektor publik yang kemudian mendorong adanya penelitian ini yakni:

1. Kompleksnya lingkungan dan tingginya pluralistik yang ada dalam sistem akuntansi sektor publik jelas akan mempengaruhi proses pengauditan yang dilakukan. Perhatian tentang bagaimana permasalahan akuntansi dan pengendaliannya secara khusus dipelajari dalam sektor publik menjadi isu yang tidak bisa diabaikan, meliputi sejauh mana laporan tersebut dapat tidak seragam, seberapa fleksibel pelaporan tersebut dapat dikembangkan dan bagaimana standar akuntansi dikembangkan dalam pelaporan keuangan sektor publik ini (Henley *et. al.*, 1993 dalam Susilo 2006).
2. Seberapa banyak dan seberapa luas pengungkapan hasil audit atas laporan keuangan sektor publik harus dilaporkan ke *stakeholders*. Hal ini dikarenakan dalam sektor publik tidak cuma mengenal audit keuangan saja, tetapi juga audit ketaatan, audit efisiensi dan ekonomi serta audit efektivitas. Sama seperti yang ada dalam sektor swasta, penganggaran dalam sektor publik adalah sebagai bagian dari kontrol manajemen. Namun, selain sebagai dokumen yang legal, penganggaran dalam sektor publik juga merupakan dokumen umum yang tersedia untuk umum meskipun tidak semua pihak dapat mengaksesnya. Konsekuensinya, penganggaran dan varians yang ada dalam sektor publik harus dilaporkan kemasyarakat (IFAC, 2000 dalam Susilo 2006). Konsekuensinya,

penganggaran dan varians yang ada dalam sektor publik harus dilaporkan ke masyarakat.

3. Munculnya perdebatan adanya revisi PSA No. 62 mengenai “Audit Kepatuhan yang Diterapkan Atas Entitas Pemerintah dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah”. PSA No. 62 ini dikodifikasi menjadi Standar Audit Seksi 801 yang digabung bersama Standar Audit lainnya dalam Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001. Karena dinilai menimbulkan standar ganda dalam pelaksanaan audit entitas pemerintahan, maka Dewan SPAP kemudian merevisi PSA No. 62 dengan Draf Publikasian PSA No. 75 yang mengatur mengenai Pertimbangan Auditor dalam Perikatan Audit Terhadap Entitas yang Terkait dengan Keuangan Negara. Dengan dimunculkannya Draf Publikasian PSA No. 75 inilah kemudian muncul perdebatan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah dengan Dewan SPAP (Wibowo, 2002 dalam Susilo 2006).

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian mengenai penilaian para pengguna laporan keuangan sektor publik terhadap informasi-informasi yang tersaji dalam laporan audit pemerintah daerah menjadi sangat dibutuhkan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kebutuhan stakeholders. Penelitian ini mengambil judul **“EKSPLORASI KEBUTUHAN STAKEHOLDERS TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN AUDIT PEMERINTAH DAERAH”**

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang ingin dipaparkan oleh penulis adalah:

1. Apakah informasi yang tersaji dalam laporan audit pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
2. Informasi apa sajakah yang dianggap penting bagi *stakeholders* yang seharusnya disajikan dalam laporan audit pemerintah daerah.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi *stakeholders* terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh BPK dapat memenuhi kebutuhan mereka akan informasi audit.
2. Untuk mengidentifikasi kebutuhan *stakeholders* akan informasi keuangan pemerintah daerah terkait dengan proses dan hasil audit dari BPK.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu kedalam praktik nyata, juga bermanfaat menambah pengetahuan akan masalah yang terjadi dari pemerintah daerah khususnya dibidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah daerah tentang kebutuhan stakeholders terhadap laporan audit pemerintah daerah.

3. Manfaat Bagi Dunia Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya topik kepustakaan khususnya dibidang akuntansi sektor publik.



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Karakteristik dan Pengertian Sektor Publik

Johan dan Maurice (2000) dalam Susilo (2006), pengertian sektor publik tidak dapat dijelaskan dari sisi semantik semata, tetapi juga terkait dengan penjelasan dari berbagai disiplin ilmu yang pada akhirnya menyebabkan adanya perbedaan cara pandang. Joedono (2000) dalam Halim (2004), menjelaskan bahwa istilah sektor publik lebih tertuju pada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara.

Abdullah (1996) dalam Halim (2004) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Bastian (2006) menjelaskan bahwa dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti:

- a. Organisasi Pemerintah Pusat
- b. Organisasi Pemerintah Daerah
- c. Organisasi Partai Politik dan LSM
- d. Organisasi Yayasan
- e. Organisasi Pendidikan dan Kesehatan: puskesmas, rumah sakit dan sekolah

- f. Organisasi tempat peribadatan: masjid, gereja, vihara, kuil

Bastian (2006) menjelaskan juga tentang karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh organisasi sektor publik, meliputi:

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi sektor publik adalah mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.

2. Aktivitas

Aktivitas yang dijalankan oleh organisasi sektor publik adalah pelayanan publik (*public services*) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan.

3. Sumber pembiayaan

Berasal dari dana masyarakat yang berujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

4. Pola pertanggungjawaban

Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

5. Kultur organisasi

Kultur organisasi yang dimiliki organisasi sektor publik bersifat birokratis, formal dan berjenjang.

## 6. Penyusunan Anggaran

Dalam penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD.

## 7. Stakeholder

Yang dikatakan sebagai stakeholders dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia; para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga Donor Internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*), *International Monetary Fund (IMF)*, *Asian Development Bank (ADB)*, Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nation Development Program (UNPD), USAID, dan pemerintah luar negeri.

### 2.1.2 Teori Agensi

Arifin (2005) dalam Dwi (2006) menjelaskan bahwa hubungan agensi merupakan kontrak baik bersifat eksplisit maupun implisit dimana satu atau lebih orang (yang disebut prinsipal) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Dalam kontrak tersebut prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan, tetapi tidak ada jaminan bahwa agen akan memaksimalkan kepentingan prinsipal.

Anggapan yang melekat pada teori keagenan adalah bahwa terdapat konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal. Konflik tersebut terjadi karena pada dasarnya setiap individu akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas sendiri sehingga ada alasan untuk percaya bahwa agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaiknya prinsipal, berarti dalam hal ini terdapat ketidakselarasan



perilaku atau tujuan antara prinsipal dengan agen, sehingga muncullah masalah yang disebut masalah agensi (Jansen and Meckling, 1976 dalam Dwi, 2006).

Scott (2002) dalam Susilo (2006) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu pihak (prinsipal) memberikan kewenangan penuh pada pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa dan mendelegasikan otoritas atau wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam pendelegasian ini agen harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada prinsipal.

Scott (2000) dan Komalasari (1999) dalam Susilo (2006) mengemukakan bahwa teori agensi mengasumsikan semua individu bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kaplan dan Anthony (1998) dalam Susilo (2006) menjelaskan bahwa suatu hubungan keagenan muncul manakala satu agen (prinsipal) memberikan amanah pengelolaan sumber daya ke pihak lain (agen), yang menurut agen untuk memberikan kewenangan penggunaan sumber daya tersebut kepada agen.

Susilo (2006) dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi ini muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. DPRD merupakan agen dari publik/warga yang ada dalam daerah tersebut. Dalam hubungan agensi yang terakhir ini, publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal.

### 2.1.3 Akuntabilitas

Triadji (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik oleh pejabat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah sangat penting dan merupakan keharusan, karena di dalam alam demokrasi sekarang ini peranan rakyat sangat

sentral. Peranan rakyat antara lain ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila akuntabilitas pemerintah dilakukan secara transparan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat utama terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis. Transparansi harus dilaksanakan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Transparansi oleh pemerintah berupa tersedianya sarana akses bagi rakyat, kemauan untuk merespon secara ikhlas, jujur dan sopan. Transparansi oleh masyarakat berupa umpan balik terhadap kinerja instansi pemerintah.

Dalam LAN dan BPKP (2000) dalam Susilo (2006), menjelaskan bahwa akuntabilitas mengandung arti kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Jenis akuntabilitas antara lain adalah akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan Tokyo Declaration of Guidelines on (1985) dalam Susilo (2006), akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program atau kegiatan.

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP dalam Susilo (2006), akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui satu media pertanggungjawaban secara periodik.

Rosjidi (2001) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat atau petugas publik baik individu/kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya (*public external accountability and environment*).

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah memberi informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas pada pelayanan publik, termasuk akuntansi yang efektif, auditing dan desentralisasi, dan

menyadarkan pegawai pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tindakan dan tanggapan mereka pada konsumen (BPKP, 2000 dalam Susilo, 2006).

#### 2.1.4 Pengauditan dalam Sektor Publik

Dalam *Accounting Principle Board* (APB) dalam Halim (2004), akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.

Mulyadi dan Kanaka (1998), pengauditan merupakan suatu proses sistematis secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Rosjidi (2001), auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti pembukuan (evidences) secara independen, selektif dan profesional dalam rangka memberikan pernyataan pendapat atau opini, dan pernyataan lain atau asersi terhadap kinerja manajemen.

Audit dalam sektor publik pada dasarnya adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka bayar. Jenis audit yang diatur oleh *Government Accounting Office's (GAO)* di Amerika Serikat adalah; audit keuangan dan ketaatan/audit ekonomi dan efisiensi serta audit program/efektivitas (Susilo: 2006).

a) **Audit Keuangan dan Ketaatan (*Financial and Regularity Audit*)**

Dalam AICPA (1988) dalam Susilo (2006) dijelaskan bahwa tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah merupakan ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan audit ketaatan adalah pengujian berkaitan dengan apakah suatu unit organisasi telah memenuhi semua peraturan yang berlaku. Malan (1984) dalam Susilo (2006) menjelaskan bahwa pengertian audit keuangan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Jones dan Bates (1990) dalam Susilo (2006) mengungkapkan bahwa terdapat dua situasi dimana kepatuhan dapat dinilai yakni; legalitas dari kegiatan mendatang yang akan dilakukan dan kepatuhan dari kegiatan yang telah dilakukan.

b) **Audit Ekonomi dan Efisiensi (*Management Audit* atau *Operational Audit*)**

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan: (1) apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan

efisien; (2) penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Dalam *The General Accounting Office Standards* (1994) dalam Mardiasmo (2002), hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi adalah:

1. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.
2. Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya wajar.
3. Melindungi dan memelihara semua sumber daya negara yang ada secara memadai.
4. Melindungi duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya.
5. Menghindari adanya pengangguran sumberdaya atau nilai jumlah pegawai yang berlebihan.
6. Menggunakan prosedur kerja yang efisien.
7. Menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) secara optimum dalam menghasilkan barang atau menyerahkan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta tepat waktu.
8. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara.
9. Telah memiliki suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau kehematan dan efisiensi pelaksanaan program.

10. Telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efisiensi dan penghematan program.

c) Audit Efektivitas (Program Audit)

Audit Commission (1986) dalam Mardiasmo (2002) efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan: (1) tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan; (2) kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya; (3) apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.

Tujuan audit efektivitas adalah untuk mengukur dampak suatu keluaran bagi pengguna jasa, meliputi:

1. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat atau relevan.
2. Menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan.
3. Menilai efektivitas program dan atau unsur program secara sendiri-sendiri.
4. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kerja yang baik dan memuaskan.

5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang baik dan dengan biaya yang rendah.
6. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait.
7. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program dengan baik.
8. Menilai ketaatan terhadap Perpu yang berlaku untuk program tersebut.
9. Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program.
10. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.

Drebin (1981) dalam Susilo (2006) menyebutkan bahwa ada sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan, yakni: pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih dan badan pengawas.

Beberapa hal yang terkait dengan laporan audit atas pemerintah daerah adalah independensi auditor pemerintah, pengungkapan memadai dalam laporan keuangan, pengambilan keputusan, kesesuaian laporan keuangan terhadap PABU, kepatuhan terhadap Standar Audit Pemerintah, pelaporan tentang kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan pengendalian intern, serta lingkup audit.

#### 2.1.5 Persepsi/Penilaian dan Kebutuhan/Harapan

Menurut Kotler (2003) dalam Rosemaryati (2004), persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan berbagai macam masukan atau informasi, guna menciptakan



gambaran yang mempunyai arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Titik berat persepsi seseorang terhadap suatu hal akan berbeda-beda.

Gibson *et. al.* (2003) dalam Rosemaryati (2004), menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dimana seorang individu memberikan arti terhadap lingkungan sekitar. Persepsi membantu individu-individu untuk memilih, mengatur, menyimpan dan menginterpretasi berbagai macam stimulus atau rangsangan kedalam gambar yang mempunyai arti. Setiap individu memberikan arti yang berbeda pada stimulus yang diperolehnya, sehingga tiap-tiap individu dimungkinkan untuk melihat hal sama dengan cara pandang yang berbeda.

Persepsi merupakan faktor psikologis, yang menjelaskan bagaimana individu melihat dan menafsirkan kejadian atau obyek. Individu akan berbuat berdasarkan persepsi mereka tanpa melihat apakah persepsi tersebut menggambarkan realita yang sebenarnya. Proses persepsi dimulai dari panca indera yaitu proses diterimanya stimulus melalui alat reseptornya, kemudian diteruskan kepusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu menyadari apa yang dialaminya dan ini dikatakan ia mengalami persepsi (Sudjana, 2001)

Philip Kotler (1993) dalam Endah (2004), menjelaskan bahwa kebutuhan merupakan adanya perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diharapkan. Kebutuhan dipengaruhi oleh rangsangan dari luar (faktor eksternal) maupun dari dalam diri (faktor internal) yaitu suatu dorongan yang timbul agar seseorang mengambil suatu tindakan yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar bagi kesejahteraan

juga sangat menentukan harapannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, sosial dan psikologis (Zeithmal, *et. al.* dalam Wirawati, 2003).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik penjelasan lebih khusus mengenai pengertian persepsi *stakeholders* terhadap laporan keuangan auditan pemerintah daerah yakni sejauh mana *stakeholders* memilih, mengorganisasikan, menginterpretasikan, stimuli dengan mempertimbangkan hal-hal penting dalam laporan keuangan auditan atau asersi yang antara lain menyangkut obyektifitas, independensi, dapat dipertimbangkan, kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum dan secara khusus disesuaikan dengan lingkungan sektor publik adalah kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, komitmen yang ada dan yang sejenisnya.

#### 2.1.6 Pemakai Laporan Keuangan Auditan Sektor Publik dan Kepentingannya

Menurut Drebin *et. al.* (1981) dalam Susilo (2006) ada sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan, yakni: pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih dan badan pengawas. Jones dan Maurice (2000) dalam Susilo (2006), bahwa pemakai keuangan sektor publik adalah; lembaga pemerintah, investor dan kreditor, pemberi sumber daya, badan pengawas, konstituen.

Beberapa hal yang terkait dengan laporan audit atas pemerintah daerah; independensi auditor pemerintah, pengungkapan memadai dalam laporan keuangan, pengambilan keputusan, kesesuaian laporan keuangan terhadap PABU, kepatuhan terhadap Standar Audit Pemerintah, pelaporan tentang kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan pengendalian intern, lingkup audit (Susilo: 2006).

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Gitoyo (1996), melakukan penelitian mengenai persepsi *stakeholders* terhadap laporan keuangan auditan untuk perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Dalam penelitian tersebut, Gitoyo membuat hipotesis bahwa persepsi *stakeholders* terhadap laporan keuangan auditan kurang memadai. Setelah dilakukan penelitian, ternyata hasil penelitian menunjukkan hal lain. Hipotesis tersebut ditolak, yang berarti bahwa persepsi *stakeholders* terhadap laporan keuangan auditan sudah memadai. Namun demikian, ketika diteliti sejauh mana tingkat memadainya persepsi *stakeholders* tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa memadainya laporan keuangan auditan tersebut masih berada pada tingkat yang rendah.

Yuliarsi (2003) dalam Susilo (2006), Eksplorasi Kebutuhan Stakeholders akan Informasi yang Tersaji dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. Penelitian ini menguji hubungan antara pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia berupa Nota PAN dengan kebutuhan *stakeholders* dan publik terhadap informasi pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Di samping itu, penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi informasi apa saja dan pelaporan bagaimana yang diinginkan publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaporan keuangan yang diterbitkan Pemerintah Pusat Indonesia berupa Nota PAN belum dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi keuangan Pemerintah Pusat.

Setyorini (2003), melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi secara empiris bagaimana persepsi pemakai atas perubahan bentuk audit (dari NPA ke SPAP) dalam meningkatkan pemahaman pemakai laporan keuangan auditan dan menguji kesenjangan ekspektasi antara auditor dengan pemakai laporan audit (analisis kredit) berdasarkan pesan yang dikomunikasikan melalui laporan audit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harapan/persepsi antara auditor independen dan analisis kredit berkaitan dengan tanggung jawab auditor independen dan analisis kredit berkaitan dengan tanggung jawab auditor independen dan keandalan laporan keuangan audit, akan tetapi diantara kedua kelompok tersebut sama-sama memiliki harapan yang sama mengenai manfaat laporan keuangan audit. Simpulan umumnya adalah bahwa perubahan bentuk laporan audit (NPA menjadi SPAP) tidak memberikan perubahan pemahaman secara signifikan kepada pemakai audit.

Gusti Ayu Putu (2004) dalam Nagu (2007) melakukan penelitian mengenai kebutuhan dan permintaan *stakeholders* akan informasi keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nota PAN (Perhitungan Anggaran Negara) belum dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi keuangan pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata survey dan adanya korelasi negatif antara penilaian publik terhadap nota PAN dengan kebutuhan publik akan informasi keuangan pemerintah pusat. Penelitian juga menunjukkan berbagai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan berbagai prosedur yang harus dilakukan dalam sistem akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah pusat agar laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah pusat dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Penelitian Joko Susilo dengan judul “Eksplorasi Kebutuhan Stakeholders terhadap Informasi dalam Laporan Audit Pemerintah Daerah” memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, antara lain dengan menggunakan variabel-variabel yang sama dan menggunakan alat analisis yang sama. Variabel yang digunakan adalah variabel persepsi/penilaian dan kebutuhan/harapan *stakeholders* terhadap informasi

dalam laporan audit pemerintah daerah. Alat analisis yang dipakai adalah uji validitas, reliabilitas, uji rata-rata, uji korelasi, uji perangkungan rata-rata dan uji binomial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan hasil audit yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemerintah daerah belum dapat memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya sangat banyak informasi yang diinginkan oleh *stakeholders* yang seharusnya disajikan dalam laporan audit pemerintah daerah.

Perbedaan antara penelitian terdahulu yang dilakukan Joko Susilo dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah salah satunya pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Propinsi Jawa Tengah yaitu di wilayah Karisidenan Banyumas yang terdiri dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara.

### 2.3 Pengajuan Hipotesis

Dari latar belakang, perumusan masalah, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menguji apakah informasi yang tersaji dalam laporan audit pemda sudah memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan informasi apa saja yang dianggap penting bagi *stakeholders* yang seharusnya disajikan dalam laporan audit pemda.

Hipotesis yang diangkat adalah:

$H_A$  : “Laporan audit pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan belum memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi-informasi hasil audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja pemerintah daerah.”

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Propinsi Jawa Tengah. Karena besarnya populasi di wilayah tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada wilayah Karisidenan Banyumas, yaitu meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

##### 3.2.1 Populasi

Dalam penelitian ini variabelnya adalah persepsi. Subyek yang menjadi komunitasnya adalah *stakeholders* organisasi sektor publik di Indonesia, baik *stakeholders* eksternal maupun *stakeholders* internal. *Stakeholders* eksternal adalah pengguna informasi keuangan sektor publik yang berada di luar sektor publik tersebut seperti masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemilih, badan pengamat/LSM, kreditur dan investor lembaga sektor publik, para analis pengelolaan keuangan sektor publik, organisasi partai politik dan anggota legislatif. Sedangkan yang dimaksud dengan *stakeholders* internal yakni para pengguna informasi keuangan sektor publik yang berada dalam lingkungan sektor publik seperti; karyawan-karyawan dan manager-manager dalam lingkungan sektor publik tersebut.

### 3.2.2 Sampel

Kelompok *stakeholders* yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah; pembayar pajak, pemilih, perbankan pemerintah daerah, perbankan swasta, badan pengamat/LSM, personel pendidik, dan partai politik.

Sampel yang diambil penulis sebanyak 260 responden, penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada pendapat Roence dalam Rosemaryati (2004) yang menyatakan bahwa jumlah sampel lebih besar 30 dan kurang dari 500 pada kebanyakan penelitian sudah mewakili.

## 3.3 Metode Pengumpulan Data

### 3.3.1 Sumber Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dapat diperoleh melalui kuisisioner (angket). Kuisisioner adalah dengan memberikan daftar pertanyaan yang sudah disediakan beserta dengan alternatif jawaban responden. Alternatif jawaban tersebut merupakan suatu pertanyaan atau penilaian. Dari hasil isiannya daftar pertanyaan oleh responden akan diperoleh data mengenai persepsi dan kebutuhan/harapan stakeholders terhadap laporan audit pemerintah daerah.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan menggunakan *library research* (riset kepustakaan), yang didapat dari buku-buku literature, jurnal-jurnal ekonomi dan bahan bacaan lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Dimana riset yang dimaksud adalah dengan membaca, mencatat dan mempelajari hal-hal yang relevan serta mendukung penelitian ini, untuk mendapatkan landasan teori yang kemudian akan digunakan untuk menganalisa, menilai dan menyimpulkan permasalahan yang ada serta pengambilan keputusan yang benar agar hasil yang ada dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan melalui kuisisioner yang dibagikan secara langsung oleh penulis atau disebar melalui bantuan rekan penulis. Kuisisioner yang dipergunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Susilo (2006). Masing-masing responden yang mengembalikan kuisisioner yang telah diisi akan dijadikan sampel penelitian. Untuk itu kuisisioner-kuisisioner dari responden tersebut diseleksi terlebih dahulu guna mendapatkan kuisisioner yang berisi secara lengkap sebagaimana dikehendaki penulis untuk kepentingan analisis.

### 3.3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar hipotesis yang diajukan dapat diuji dan pertanyaan penelitian dapat dijawab.



Instrumen pengukuran variabel yang akan digunakan dalam suatu penelitian dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti atau mengadopsi dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi instrumen pengukuran yang telah dikembangkan dan diuji validitasnya oleh peneliti sebelumnya.

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Persepsi/Penilaian *Stakeholders*

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah persepsi *stakeholders* terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit pemerintah daerah. Untuk memperoleh data mengenai penilaian *stakeholders* digunakan daftar pertanyaan atau kuisisioner. Persepsi yang diungkap melalui daftar pertanyaan diukur dengan skala ordinal.

Variabel penilaian *stakeholders* terhadap laporan audit dibangun dengan pengukuran konstruk karakteristik kualitatif laporan audit dan luas lingkup audit dalam sektor publik (NALGA: 1999 dalam Susilo: 2006). Karakteristik kualitatif dalam laporan audit tersebut meliputi: independensi, penjelasan memadai, kesesuaian dengan PABU, kesesuaian dengan SAP, kesesuaian dengan peraturan pemerintah, penerapan standar pengauditan, informasi salah saji material, dasar-dasar pembuatan opini, struktur pengendalian intern, informasi untuk pengambilan keputusan, efisiensi program, informasi penggunaan dana publik, pengelolaan dana publik, efisiensi pengadaan sumber daya, informasi indikasi kecurangan

dan kebohongan publik, efektivitas dari program-program, ketepatan dan relevansi program.

Pada penelitian ini variabel kebutuhan diukur dengan menggunakan kuisioner, dengan *Skala Likert* 5 point dengan skor terendah 1 (sangat tidak setuju) dan tertinggi 5 (sangat setuju).

b) *Kebutuhan Stakeholders*

Variabel kebutuhan *stakeholders* akan informasi dalam laporan audit pemerintah daerah dibangun dengan konstruk informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan tipe dan luas lingkup audit yang berlaku untuk pemerintah daerah seperti audit keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja (GAO: 1994 dalam Susilo: 2006).

Pada penelitian ini variabel kebutuhan diukur dengan menggunakan kuisioner, dengan *Skala Likert* 3 point dengan skor terendah 1 (tidak) dan tertinggi 3 (ya).

### **3.4 Alat Analisis Data**

#### **3.4.1 Uji Validitas**

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (skala atau tes) dalam melakukan fungsi ukurnya dalam suatu mekanisme kontrol dalam metode penelitian survey. Hal ini menjadi penting karena melalui pengujian validitas alat ukur akan dapat

mengatasi masalah-masalah yang timbul dari praktik pengukuran. Validitas akan mempersoalkan, apakah instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu atribut, betul-betul mengukur atribut yang dimaksud. Dengan demikian, validitas menunjukkan apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian mencapai taraf kesahihan sehingga dapat berguna atau tidak.

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu dapat mengukur apa yang ingin diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, semakin tepat pula alat ukur tersebut menuju sasarannya. Alat ukur yang valid adalah yang memiliki varians eror yang kecil (karena eror pengukurannya kecil) sehingga angka yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai angka sebenarnya/angka yang mendekati keadaan sebenarnya. Ukuran yang valid yang mencapai/mendekati angka 1,0. Perhitungan valid, jika nilai korelasi setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai kritis atau korelasi tabel ( $R_h > R_t$ ). Langkah pertama, menyebarkan angket kepada responden yang memiliki karakteristik yang mirip dengan responden sebenarnya. Kedua, membuat tabel tabulasi jawaban dan menghitung skor variabel dari skor butir, dimana jumlah skor butir merupakan skor variabel. Ketiga, menghitung koefisien korelasinya dengan teknik korelasi *product moment*. Untuk mengetahui apakah nilai korelasinya signifikan atau tidak, maka diperlukan tabel signifikan nilai dari *product moment*. Pengoperasian uji validitas dilakukan dengan menggunakan program statistik melalui program komputerisasi SPSS For Windows.

### 3.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana taraf alat ukur mempunyai keajegan (konsisten) dalam pengukuran. Dari alat ukur (skala atau tes) tersebut, hal ini berarti bahwa suatu alat ukur memiliki reliabilitas sempurna apabila hasil pengukuran diujikan berkali-kali terhadap subyek yang sama selalu menunjukkan hasil atau skor yang sama. Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur tersebut mempunyai kendala dalam pengukuran.

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten, apabila pengukurannya diulangi dua kali/lebih. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi merupakan pengukuran yang mampu memberikan hasil ukuran yang handal (reliabel). Pengujian reliabilitas kuisioner dilakukan dengan teknik *Alpha Cronbach's*. Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien yang mempunyai rentang antara 0,0 sampai 1,0. Di samping itu, walaupun koefisien korelasi dapat saja bertanda negative (-), koefisien reliabilitas selalu mengacu pada angka positif (+) dikarenakan angka yang negatif tidak ada artinya bagi interpretasi reliabilitas hasil ukur. Jika nilai  $r_{11} > r_t$  maka instrument yang digunakan tidak reliabel, namun jika ternyata  $r_{11} > r_t$  maka dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan reliabel. Suatu variabel akan dikatakan handal apabila nilai koefisien *Alpha Cronbach's*-nya positif dan lebih besar. Penerapan uji reliabilitas menggunakan bantuan program statistik melalui program komputerisasi SPSS For Windows.

### 3.4.3 Uji Rata-rata Penilaian *Stakeholders*

Pengukuran rata-rata instrumen variabel penilaian *stakeholders* terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit diperlukan untuk menjelaskan secara detail sejauh mana *stakeholders* menilai informasi-informasi tersebut.

### 3.4.4 Uji Korelasi

Korelasi merupakan asosiasi (hubungan) antara variabel-variabel yang diminati. Dalam korelasi akan disoroti dua aspek untuk analisis korelasi, yaitu apakah data sampel yang ada menyediakan bukti cukup bahwa ada kaitan antara variabel-variabel dalam populasi asal sampel. Dan yang kedua, jika ada hubungan, seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut. Keeratan hubungan itu dinyatakan dengan nama koefisien korelasi

*Correlation coefficients* yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pearson. Untuk menampilkan koefisien korelasi yang dihitung dengan metode *Pearson* pada hasil analisis.
- b. Kendall's. Untuk menampilkan koefisien korelasi non parametrik Kendall yakni ukuran asosiasi dari variabel-variabel ordinal.
- c. Spearman. Untuk menampilkan versi non parametrik dari koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi yang dihasilkan oleh Spearman ini juga merupakan ukuran asosiasi yang sangat cocok untuk variabel-variabel ordinal.

Pegujian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu apakah informasi dalam laporan audit yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa

Kuangan RI sudah memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi laporan audit meliputi audit keuangan, audit kepatuhan dan audit kinerja.

#### 3.4.5 Uji Perangkingan Rata-rata Kebutuhan *Stakeholders*

Pengujian ini dilakukan dengan merangking instrumen-instrumen yang terdapat dalam kategori kebutuhan *stakeholders* berdasarkan rata-rata hitung masing-masing instrumen. Jika rata-rata hitung suatu instrumen lebih besar dari 2,5 maka informasi tersebut dianggap penting dan wajib disajikan dalam laporan audit pemerintah daerah. Jika rata-rata hitung suatu instrumen berada di antara 1,5–2,5 maka informasi tersebut dianggap tidak begitu penting namun akan lebih baik jika informasi tersebut disajikan dalam laporan audit pemerintah daerah. Sedangkan untuk rata-rata hitung instrumen berada di bawah 1,5 maka informasi tersebut dapat dianggap tidak penting dan dapat diabaikan dalam laporan audit.

#### 3.4.6 Uji Binomial

Uji binomial digunakan untuk menguji sebuah sampel, apakah ciri tertentu dari sampel tersebut bisa dianggap sama dengan populasinya.

Pengujian binomial dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah perbedaan peringkat antara informasi yang sangat penting, moderat, dan tidak penting dari hasil uji perangkingan rata-rata instrumen kebutuhan *stakeholders* adalah perbedaan yang signifikan atau hanya kebutuhan belaka. Pengujian ini dilakukan dengan uji beda dua rata-rata (*two mean test*), dengan suatu hipotesis berikut ini:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ atau } \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Kriteria pengujian dalam uji binomial ini dilakukan dengan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  dan dasar pengambilan keputusan adalah jika probabilitasnya (*exact.syg*) lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak atau dengan penjelasan lain  $H_1$  diterima.



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi *stakeholders* terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh BPK dapat memenuhi kebutuhan mereka akan informasi audit yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi kebutuhan *stakeholders* akan informasi keuangan pemerintah daerah terkait dengan proses dan hasil audit dari BPK. Analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini terbagi dalam dua analisis yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menyajikan data dalam bentuk persentase. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu analisis yang terdiri dari angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik.

Sumber data diperoleh dari data primer melalui kuesioner yang disebar yaitu data hasil jawaban *stakeholders* yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik diketahui bahwa populasi Kabupaten Banyumas sebesar 1.603.000 jiwa, Kabupaten Cilacap sebesar 1.727.607 jiwa, Kabupaten Purbalingga sebesar 849.831 jiwa dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 862.483 jiwa. Karena cukup besarnya populasi yang berada di Karisidenan Banyumas, maka penulis memberi batasan dalam penyebaran kuesioner yaitu dalam penyebarannya ditujukan kepada



kelompok pembayar pajak, pemilih, perbankan pemerintah daerah, perbankan swasta, badan pengamat/LSM, personel pendidik, dan partai politik. Peneliti memilih kelompok tersebut karena kelompok tersebut berhak memperoleh dan memberikan penilaian mengenai transparansi laporan audit pemerintah daerah, serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2006). Peneliti telah menyebarkan kuesioner sebanyak 260 eksemplar dengan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 218 eksemplar, dan rusak sebanyak 32 eksemplar, sehingga total kuesioner yang dapat dijadikan sebagai sumber data hanya 186 responden atau 71,54% dari jumlah kuesioner yang disebar. Hasil penyebaran kuesioner ini dapat disajikan pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Penyebaran Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	260	100%
Data yang Kembali	218	83.85%
Kuesioner yang Rusak	32	12.31%
Kuesioner yang bisa digunakan	186	71.54%

Sumber: Data primer yang diolah, 2008

Sebelum dilakukan analisis terhadap data penelitian terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data yaitu dengan uji validitas dan reliabilitas agar kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan hasil yang bias.

#### **4.1 Uji Kualitas Data**

Meskipun kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah digunakan oleh Joko Susilo (2006), peneliti memandang perlu melakukan penelitian karena responden yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan peneliti

sebelumnya baik dalam hal waktu, tempat maupun kondisi. Dengan menggunakan instrumen valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan peneliti juga akan valid dan reliabel.

#### 4.1.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan responden sebanyak 186 responden. Syarat-syarat yang ditentukan untuk menyatakan bahwa setiap pernyataan adalah valid yaitu jika angka korelasi hasil perhitungan lebih besar dibandingkan dengan angka kritik pada taraf signifikan 5% (Ghozali, 2001 dalam Susilo 2006). Suatu instrumen dapat dinyatakan valid jika memiliki nilai probabilitas ( $p$ -value)  $< 0,05$ . Adapun perhitungan selengkapnya tentang pengujian validitas ini dapat dilihat dalam Lampiran V.

Seperti telah dikemukakan pada lampiran, diketahui bahwa semua item pertanyaan baik berupa persepsi (soal 1 – soal 17) maupun harapan (soal 1 – soal 27) adalah valid. Dari hasil uji validitas seperti pada lampiran tentang persepsi *stakeholder* dan kebutuhan *stakeholder* seluruhnya memiliki nilai probabilitas  $< 0,05$  bahkan nilai kurang dari 1%, maka semua butir dalam penelitian dapat dinyatakan valid pada level 1%.

#### 4.1.2 Uji Keandalan Instrumen Penelitian (Reliability Test)

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Program SPSS memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ )  $\geq 0,6$  (Ghozali, 2001 dalam Susilo

2006). Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan bantuan program komputer SPSS 11.0 dapat dilihat seperti pada Lampiran VI.

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* untuk kedua variabel penelitian yaitu persepsi *stakeholders* dan kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit Pemda oleh BPK lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori di atas maka semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

#### **4.2 Identifikasi Responden**

Identifikasi responden digunakan untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti dilakukan pengolahan terhadap data kasar melalui perhitungan statistik deskriptif. Dengan mendeskripsikan skor dari suatu ubahan atau variabel yang ada didapatkan suatu gambaran tentang permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden atas dasar pertanyaan dalam kuesioner.

#### 4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden

Umur responden dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap laporan audit BPK, karena pengalamannya terhadap informasi laporan keuangan tersebut. Tabel 4.2 menunjukkan umur responden.

**Tabel 4.2**  
**Klasifikasi Responden berdasarkan Umur Responden**

Umur	Jumlah orang	Persentase
< 30 tahun	62	33.3%
30 - 39 tahun	39	21.0%
40 - 49 tahun	52	28.0%
50 - 59 tahun	33	17.7%
Total	186	100.0%

Sumber: Data primer yang diolah, 2008

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa mayoritas *stakeholders* berusia kurang dari 30 tahun yaitu sebesar 33,3%. Sedangkan *stakeholders* lainnya berusia antara 40 – 49 tahun sebesar 28%, berusia antara 30 – 39 tahun sebesar 21% dan *stakeholders* yang berusia antara 50 – 59 tahun yaitu sebesar 17,7%. Hal ini disebabkan pemakai laporan keuangan yang cukup kritis terhadap audit BPK di pemerintah daerah mayoritas adalah mahasiswa, atau eksekutif muda sehingga sebagian besar *stakeholders* yang dijadikan sampel penelitian ini memiliki usia yang masih muda.

#### 4.2.2 Domisili Responden

Berdasarkan domisili responden terbagi dalam 4 kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara. Hasil jawaban *stakeholders* berdasarkan domisili responden dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Domisili Responden**

Domisili	Jumlah orang	Persentase
Banjarnegara	52	28.0%
Banyumas	46	24.7%
Cilacap	59	31.7%
Purbalingga	29	15.6%
Total	186	100.0%

Sumber: Data primer yang diolah, 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden diambil dari kabupaten Cilacap yaitu sebesar 31,7%. Selanjutnya secara berurutan dari kabupaten Banjarnegara sebesar 28%, Banyumas sebesar 24,7% dan Purbalingga sebesar 15,6%. Hasil ini cukup proporsional, mengingat kabupaten Cilacap merupakan kota paling besar diantara kabupaten yang ada, sehingga kebutuhan informasi *stakeholders* akan lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

#### 4.2.3 Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi *stakeholders* terhadap informasi laporan keuangan yang diaudit oleh BPK. Dari hasil angket yang telah disebarakan diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.4

**Tabel 4.4**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan terakhir	Frequency	Percent
SLTA	74	39.8%
D3	23	12.4%
S1	72	38.7%
S2	17	9.1%
Total	186	100.0%

Sumber: Data primer yang diolah, 2008

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 186 responden yang diteliti sebanyak 39,8% berpendidikan terakhir SLTA, sebanyak 12,4% berpendidikan D3, sebesar 38,7% berpendidikan terakhir S1, dan sebesar 9,1% berpendidikan terakhir S2. Hal ini menunjukkan responden mayoritas berpendidikan terakhir menengah keatas, sehingga tingkat pengetahuan dan intelengensinya cenderung tinggi. Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi responden mampu memberikan penilaian terhadap laporan audit dari pemerintah daerah.

#### 4.2.4 Status Responden

Status responden terbagi menjadi 6 kelompok yaitu mahasiswa, pegawai negeri, pegawai edukatif, pegawai swasta, LSM dan partai politik. Dari hasil angket yang telah disebarakan diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.5

**Tabel 4.5**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Status**

Status	Frequency	Percent
Mahasiswa	33	17.7%
Pegawai Negeri	54	29.0%
Pegawai Edukatif	25	13.4%
Pegawai Swasta	37	19.9%
LSM	21	11.3%
Organisasi Politik	16	8.6%
Total	186	100.0%

Sumber: Data primer yang diolah, 2008

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 186 responden yang diteliti sebesar 17,7% berstatus mahasiswa, sebesar 29% berstatus Pegawai Negeri, sebesar 13,4% berstatus pegawai edukatif, sebesar 19,9% pegawai

swasta, 11,3% anggota LSM, dan sebesar 8,6% organisasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas *stakeholders* adalah pegawai negeri.

#### 4.2.5 Masa Kerja

Masa kerja responden mempengaruhi pengetahuan, pandangan, serta penilaian *stakeholders* pada informasi laporan audit pemerintah daerah. Dari hasil angket yang telah disebarakan diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.6

**Tabel 4.6**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja**

Pengalaman Status	Frequency	Percent
1 - 2 tahun	19	10.2%
3 - 4 tahun	43	23.1%
4 - 5 tahun	7	3.8%
5 - 6 tahun	12	6.5%
> 6 tahun	105	56.5%
Total	186	100.0%

Sumber: Data primer yang diolah, 2008

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 186 responden yang diteliti sebesar 10,2% memiliki masa kerja antara 1 – 2 tahun, 3 – 4 tahun sebesar 23,1%, antara 4 – 5 tahun sebesar 3,8%, antara 5 – 6 tahun sebesar 6,5% dan lebih dari 6 tahun sebesar 56,5%. Dengan demikian mayoritas responden memiliki masa kerja yang cukup lama atau lebih dari 6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memiliki cukup informasi tentang laporan audit daerah, sehingga penilaian terhadap laporan audit daerah oleh kelompok ini lebih representatif.

### 4.3 Hasil Rata – Rata Penilaian *Stakeholder* pada Laporan Audit Pemerintah Daerah Karisidenan Banyumas

Pengukuran rata-rata instrumen variabel penilaian *stakeholders* terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit diperlukan untuk menjelaskan secara detail sejauh mana *stakeholders* menilai informasi-informasi tersebut. Pengujian ini juga menunjukkan sejauh mana laporan audit pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* atas informasi yang ada dalam laporan audit tersebut.

Hasil rata-rata persepsi *stakeholders* akuntansi terhadap laporan audit pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.7**  
**Analisis Deskriptif terhadap Persepsi *Stakeholders***  
**Terhadap Informasi Laporan Audit Pemerintah Daerah**

No	Instrument	Rata - rata	Keterangan
1	BPK bersikap independen dalam melakukan pemeriksaan	3.73	Setuju
2	Laporan sudah cukup memadai	3.48	Setuju
3	Sesuai dengan prinsip laporan akuntansi	3.50	Setuju
4	Sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan	3.65	Setuju
5	Jaminan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku	3.65	Setuju
6	Jaminan kesesuaian dengan standar pengauditan yang berlaku	3.51	Setuju
7	Laporan keuangan wajar dan bebas dari salah saji material	3.68	Setuju
8	Berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan	3.48	Setuju
9	Dilakukan pengujian data atas struktur pengendalian intern	3.66	Setuju
10	Dapat digunakan untuk pengambilan keputusan	3.65	Setuju
11	Jaminan efisiensi dari program dalam mencapai tujuan	3.45	Setuju
12	Jaminan kesesuaian pendanaan dengan peraturan yang berlaku	3.34	Netral
13	Jaminan bahwa penerimaan dana dari warga sudah dikumpulkan	3.70	Setuju
14	Jaminan bahwa Pemda telah melakukan pengadaan sumber daya	3.82	Setuju
15	Jaminan auditor dapat menemukan adanya kecurangan	3.69	Setuju



No	Instrument	Rata-rata	Keterangan
16	Jaminan efektivitas dari program - program dalam mencapai tujuan	3.46	Setuju
17	Jaminan bahwa program berjalan dengan baik	3.68	Setuju
<b>Rata - rata total</b>		<b>3.60</b>	<b>Setuju</b>

Sumber: Data primer diolah, 2008

Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap informasi laporan audit pemerintah daerah Karisidenan Banyumas adalah sebesar 3,60. Sedangkan persepsi responden tertinggi terjadi pada jaminan bahwa Pemda telah melakukan pengadaan sumber daya dengan rata-rata sebesar 3,82 (setuju), dan penilaian terendah terjadi pada instrument jaminan kesesuaian pendanaan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berarti konsumen telah memberikan penilaian yang tinggi terhadap informasi laporan audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Karisidenan Banyumas karena berada pada interval 3,40 – 4,20.

Hal ini berarti *stakeholders* telah memberikan persepsi yang baik terhadap informasi laporan audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Karisidenan Banyumas. Publik sebagai *stakeholders* menilai bahwa informasi yang ada dalam laporan audit pemerintah daerah sampai saat ini sudah memenuhi kebutuhan mereka akan informasi hasil audit, baik audit keuangan, audit efisiensi dan ekonomi, audit kepatuhan. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah akan membawa dampak perubahan terhadap pola dan sistem pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, sistem pengendalian berada dalam kendali DPRD sebagai pihak legislatif yang dilakukan pada tahap awal, sistem pengendalian dipegang oleh Bawasda

yang dilakukan sepanjang proses kegiatan organisasi, dan sistem pemeriksaan dilakukan oleh BPK pada tahap akhir pengelolaan pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut. Perubahan-perubahan dalam ketiga sistem ini tentu saja menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan agar pengelolaan daerah lebih transparan, terbuka dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.

Informasi dalam laporan audit keuangan yang disampaikan pemerintah daerah Karisidenan Banyumas sudah memenuhi kebutuhan *stakeholders*, hal ini didukung karena adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum.

Leeuw (1996) dalam Susilo (2006) menegaskan bahwa audit kinerja sebagaimana audit keuangan telah membawa perubahan yang menjadikan kinerja dalam sektor publik semakin efisien dan efektif. Sementara itu, Hamburger (1989) dalam Susilo (2006) menambahkan bahwa audit efisiensi berpotensi untuk meningkatkan secara signifikan akuntabilitas eksekutif terhadap legislatif. Sayangnya, kebanyakan dari anggota legislatif tidak memahami apa yang dimaksud dengan audit efisiensi. Ini terjadi di Australia pada tahun 1978, dan terjadi di Indonesia pada abad 20 ini. Audit efisiensi dibentuk sebagai bagian dari seperangkat perubahan yang didesain untuk meningkatkan *accountability* dan *responsiveness* dari agen sektor publik kepada atasan politik mereka atau kepala

kiennya. Audit efisiensi ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai apa yang disebut dengan *value for money*. Mengutip dari Adam (1986) dalam Susilo (2006), audit efisiensi meliputi “penilaian dari kinerja manajemen dan operasional dari departemen dan agen dalam penggunaan dana, tenaga kerja dan sumber daya lainnya.

Dittehofer (2001) dalam Susilo (2006) menambahkan bahwa audit kepatuhan dalam organisasi pemerintah merupakan suatu keunikan tersendiri. Dengan audit tersebut, perhatian auditor difokuskan tidak saja untuk mengaudit keuangan saja tetapi juga untuk menilai kepatuhan kinerja pemerintah dengan hukum, aturan, dan ketentuan lainnya. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya dapat bertindak sesuai dengan apa yang diijinkan/ditetapkan untuknya. Audit kepatuhan dalam sektor publik juga harus mempertimbangkan aspek kerjasama, hadiah dan instrumen lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengungkapan dalam laporan audit akan lebih jelas apabila di dalam laporan audit tersebut dipisahkan masing-masing pendapat baik mengenai laporan keuangan, pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan, konsistensi dengan informasi lainnya, tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor.

#### **4.4 Uji Korelasi**

Pengujian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu apakah informasi dalam laporan audit yang diterbitkan oleh BPK sudah memenuhi *stakeholders* akan informasi laporan audit meliputi audit keuangan, audit kepatuhan dan audit kinerja.

Jika nilai korelasi positif, maka berarti laporan audit pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi audit pemerintah daerah. Sedangkan jika terdapat korelasi negatif, ini berarti laporan audit pemerintah daerah belum dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi audit pemerintah daerah. Hasil pengujian korelasi terhadap dua variabel tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Korelasi**

Jenis Korelasi	Koefisien Korelasi	p-value
Korelasi Pearson	0,481	0,000
Korelasi Kendall	0,162	0,002
Korelasi Spearman	0,219	0,003

Sumber: Data primer yang diolah, 2008

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa, angka korelasi antara variabel persepsi *stakeholders* terhadap informasi laporan audit pemerintah daerah dengan variabel kebutuhan *stakeholders* akan informasi laporan audit pemerintah daerah adalah sebesar 0,481 dan  $p=0,000 < 0,05$ , yang menunjukkan terdapat hubungan positif antara persepsi *stakeholders* dengan kebutuhan *stakeholders*. Artinya semakin besar persepsi *stakeholders* maka kebutuhan *stakeholders* akan semakin tinggi. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,481 menunjukkan adanya hubungan yang lemah.

Hasil uji korelasi Kendall menunjukkan bahwa, angka korelasi antara variabel persepsi *stakeholders* terhadap informasi laporan audit pemerintah daerah dengan variabel kebutuhan *stakeholders* akan informasi laporan audit pemerintah

daerah adalah sebesar 0,162 dan  $p=0,002<0,05$ , yang menunjukkan terdapat hubungan positif antara persepsi *stakeholders* dengan kebutuhan *stakeholders*. Artinya semakin besar persepsi *stakeholders* maka kebutuhan *stakeholders* akan semakin tinggi. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,162 menunjukkan adanya hubungan yang lemah.

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa, angka korelasi antara variabel persepsi *stakeholders* terhadap informasi laporan audit pemerintah daerah dengan variabel kebutuhan *stakeholders* akan informasi laporan audit pemerintah daerah adalah sebesar 0,219 dan  $p=0,003<0,05$ , yang menunjukkan terdapat hubungan positif antara persepsi *stakeholders* dengan kebutuhan *stakeholders*. Artinya semakin besar persepsi *stakeholders* maka kebutuhan *stakeholders* akan semakin tinggi. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,219 menunjukkan adanya hubungan yang lemah.

Dari ketiga jenis uji korelasi di atas menunjukkan bahwa semua korelasi yang terjadi adalah positif, yakni korelasi antara variabel penilaian *stakeholders* terhadap informasi laporan audit pemerintah daerah dengan variabel kebutuhan *stakeholders* akan informasi laporan audit pemerintah daerah. Koefisien korelasi positif menunjukkan bahwa pelaporan hasil audit yang diterbitkan oleh BPK untuk pemerintah daerah sudah dapat memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*, namun demikian keeratan hubungan kedua variabel bebas tersebut masih dapat dinyatakan lemah karena masih di bawah angka 0,5. Semakin tinggi korelasi positif yang terjadi, maka berarti semakin tinggi pula tingkat kesesuaian informasi yang tersaji dalam laporan audit pemerintah daerah dengan

kebutuhan/harapan informasi yang dibutuhkan. Hal ini dapat diartikan bahwa laporan audit tersebut baik di sisi publik, namun demikian laporan audit tersebut harus tetap diperbaiki dan disempurnakan sehingga lebih akuntabel.

#### 4.5 Hasil Uji Perangkingan Rata-Rata Kebutuhan *Stakeholders*

Pengujian berikutnya dalam penelitian ini adalah uji perangkingan rata-rata kebutuhan *stakeholders*. Pengujian ini dilakukan dengan merangking instrumen-instrumen yang terdapat dalam kategori kebutuhan *stakeholders* berdasarkan rata-rata hitung masing-masing instrumen. Jika rata-rata hitung suatu instrumen lebih besar dari 2,5 maka informasi tersebut dianggap penting dan wajib disajikan dalam laporan audit pemerintah daerah. Jika rata-rata hitung suatu instrumen berada diantara 1,5 – 2,5 maka informasi tersebut dianggap tidak begitu penting namun akan lebih baik jika informasi tersebut disajikan dalam laporan audit pemerintah daerah. Sedangkan untuk rata-rata hitung instrumen berada di bawah nilai 1,5 maka informasi tersebut dapat dianggap tidak penting dan dapat diabaikan dalam laporan audit.

Hasil perankingan instrumen kebutuhan *stakeholders* dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Perangkingan Kebutuhan *Stakeholders***

No	Instrument	Rata - rata	Keterangan
1	Jaminan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana publik diotorisasi dengan benar	2.89	Penting
2	Dibutuhkan informasi mengenai kesesuaian pendanaan aktivitas dan program	2.48	Tidak begitu penting
3	Evaluasi penerimaan dana dari warga yang dikumpulkan	2.83	Penting
4	Evaluasi mengenai kewajaran dan kebenaran penyajian laporan keuangan	2.82	Penting

No	Instrument	Rata-rata	Keterangan
5	Jaminan bahwa auditor mampu menemukan indikasi kecurangan	2.90	Penting
6	Evaluasi kehandalan dan ketaatan sistem pengendalian	2.76	Penting
7	Evaluasi kesesuaian seluruh aktivitas pengelolaan dana publik	2.80	Penting
8	Evaluasi mengenai aktivitas Pemda dalam mengikuti ketentuan	2.74	Penting
9	Informasi dalam mengevaluasi Pemda telah melakukan pengadaan sumber daya	2.71	Penting
10	Usaha Pemda dalam melindungi sumber daya negara	2.72	Penting
11	Usaha Pemda dalam menghindari duplikasi pekerjaan	2.91	Penting
12	Usaha Pemda dalam menghindari pengangguran sumber daya	2.86	Penting
13	Evaluasi mengenai efisiensi prosedur kerja dari Pemda	2.90	Penting
14	Evaluasi mengenai optimalisasi penggunaan sumber daya Pemda	2.67	Penting
15	Evaluasi mengenai kepatuhan Pemda	2.92	Penting
16	Evaluasi mengenai usaha Pemda dalam sistem pengendalian manajemen	2.91	Penting
17	Evaluasi bahwa Pemda melaporkan ukuran yang sah	2.89	Penting
18	Dibutuhkan informasi untuk mengevaluasi tujuan program	2.78	Penting
19	Dibutuhkan informasi mengenai penentuan tingkat pencapaian hasil	2.90	Penting
20	Dibutuhkan informasi mengenai efektivitas program	2.91	Penting
21	Memberikan evaluasi identifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kerja	2.90	Penting
22	Memberikan evaluasi tentang program yang saling melengkapi	2.90	Penting
23	Memberikan evaluasi manajemen tentang pelaksanaan program yang efisien	2.88	Penting
24	Memberikan evaluasi cara melaksanakan program yang baik	2.49	Tidak begitu penting
25	Memberikan evaluasi tentang peraturan yang berlaku	2.83	Penting
26	Memberikan evaluasi tentang SPM	2.88	Penting
27	Memberikan evaluasi tentang melaporkan ukuran yang sah	2.89	Penting

Sumber: Data primer yang diolah, 2008

Hasil uji ini menunjukkan bahwa sebenarnya sangat banyak informasi yang diinginkan oleh *stakeholders* yang seharusnya disajikan dalam laporan audit pemerintah daerah. Dari semua instrumen yang dikutip dari *GAO Standards* (Susilo, 2004) tersebut dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar instrumen dinilai oleh *stakeholders* sangat penting untuk disajikan. Dari semua instrumen

tersebut sebanyak 27 item, dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar instrumen dinilai oleh *stakeholders* sangat penting untuk disajikan dan ada dua instrumen yang dinilai oleh *stakeholders* tidak begitu penting (moderat) untuk disajikan. Kedua instrumen kebutuhan informasi tersebut adalah :

1. Informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai kesesuaian pendanaan aktivitas-aktivitas dan program-program yang dilaksanakan dengan aturan yang berlaku untuknya.
2. Informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai identifikasi cara untuk dapat melaksanakan program dengan baik.

Dari kedua puluh tujuh instrumen kebutuhan *stakeholders* ternyata hanya 25 instrumen yang dibutuhkan. Selain itu masih terdapat instrumen tambahan yang diperoleh dari hasil jawaban pada pertanyaan terbuka mengenai informasi selain yang disebutkan dalam 27 instrumen di atas. Instrumen tambahan ini meliputi :

1. Informasi mengenai sumber daya yang baik
2. Adanya perhitungan laporan keuangan yang jelas
3. Jaminan laporan audit yang tepat waktu
4. Jaminan tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun
5. Informasi laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan

#### **4.6 Uji Binomial**

Pengujian binomial dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah perbedaan peringkat antara informasi yang sangat penting dengan informasi yang



moderat cukup berbeda secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji beda dua rata-rata (two means test), dengan suatu hipotesis statistik berikut ini:

$$H_0 = \mu_1 = \mu_2 \text{ atau } \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_a = \mu_1 \neq \mu_2$$

Kriteria pengujian dalam uji binomial ini dilakukan dengan taraf signifikansi 5% dan dasar pengambilan keputusan adalah jika probabilitasnya (Exact.Sig) lebih besar dari 0,5 maka  $H_0$  diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak atau dengan penjelasan lain  $H_A$  diterima. Berikut hasil uji binomial yang dilakukan dengan program SPSS 13.

**Tabel 4.10**  
**Uji Binomial**

**Binomial Test**

	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
Peringkat Informas Group 1	> 2,5	25	.93	.50	.000 <sup>a</sup>
Group 2	<= 2,5	2	.07		
Total		27	1.00		

a. Based on Z Approximation.

Dari hasil uji binomial di atas angka asymp.sig yang tertera pada hasil pengujian yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dengan hasil ini  $H_A$  diterima atau  $H_0$  ditolak. Ini berarti bahwa perbedaan peringkat kategori antara informasi yang sangat penting dengan informasi yang moderat pada hasil uji perangkaan rata-rata kebutuhan *stakeholders* terjadi secara signifikan dan bukan terjadi karena kebetulan semata. Penjelasan lain dari hasil uji binomial ini adalah, perbedaan peringkat kategori antara informasi yang sangat penting dengan informasi yang moderat pada hasil uji perangkaan rata-rata kebutuhan *stakeholders* dilakukan dengan fair, bukan direkayasa oleh peneliti. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa informasi yang dinilai penting oleh *stakeholders* untuk disajikan dalam laporan audit memang penting dan tidak begitu penting karena suatu kebetulan yang dikarenakan sifat sampel penelitian ini.

#### **4.7 Pembahasan dan Implikasi Manajerial**

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah akan membawa dampak perubahan terhadap pola dan sistem pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Sistem pengawasan adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi. Sistem pengendalian adalah suatu sistem pengendalian yang dilakukan oleh pihak di dalam organisasi tersebut. Sistem pemeriksaan adalah sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi dan benar-benar independen. Dalam lingkungan pemerintah daerah, sistem pengendalian berada dalam kendali DPRD sebagai pihak legislatif yang dilakukan pada tahap awal, sistem pengendalian dipegang oleh Bawasda yang dilakukan sepanjang proses kegiatan organisasi, dan sistem dilakukan oleh BPK pada tahap akhir pengelolaan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut. Perubahan-perubahan ketiga sistem ini tentu saja menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan agar pengelolaan daerah lebih transparan, terbuka dan bertanggungjawab atas kebijakan yang diambil. Perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, maka diperlukan peran DPRD dan publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa pemberian otonomi daerah ini bukanlah tanpa kendala sama sekali. Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah kemungkinan terjadinya perpindahan penyelewengan dan KKN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah lokal dicerminkan melalui pelaporan eksternal otoritas lokal, yang dikembangkan dengan bentuk yang berbeda dan paralel dengan metode pelaporan sektor swasta (BPKP 2000 dalam Susilo, 2004).

Para otoritas lokal, mengetahui akuntabilitasnya kepada para pemilih dan salah satu media yang digunakan adalah sebagaimana melalui pelaporan eksternal otoritas lokal. Berdasarkan pengaruh dari komisi audit, maka dari otoritas lokal ini didorong untuk melaporkan kinerja kegiatannya. Hal ini dilakukan dengan cara (BPKP 2000 dalam Susilo, 2004).

1. Membuat laporan mengenai praktik-praktik manajemen yang baik pada kegiatan-kegiatan yang spesifik.
2. Membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai praktik-praktik manajemen yang baik.
3. Melakukan studi khusus terhadap individu *authorities*
4. Membuat suatu institusi sistem monitoring untuk mereview pencapaian kinerja (*value for money*) bagi otoritas individu.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa publik sebagai *stakeholders* menilai bahwa informasi yang ada dalam laporan audit pemerintah daerah sampai saat ini sudah memenuhi kebutuhan mereka akan informasi hasil

audit, baik audit keuangan, audit efisiensi dan ekonomi, dan audit kepatuhan. Soedibyo (2002) dalam Susilo (2004) mengemukakan bahwa terdapat sedikit informasi yang dapat dijumpai sehubungan dengan kesuksesan ataupun kegagalan dalam aktivitas-aktivitas yang dikelola pemerintah. Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa terkait dengan sistem audit untuk pemerintah daerah, memandang perlunya suatu langkah reformasi audit (*audit reform*) dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Soedibyo (2002) dalam Susilo (2004) menambahkan, dalam era reformasi ini harus ada alternatif usaha untuk mencapai akuntabilitas atau pertanggungjawaban informasi melalui pelaporan yang lebih baik. Tuntutan pembaruan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sebagai tercipta akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data seperti pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Laporan audit pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sudah memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi-informasi hasil audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja pemerintah daerah”. Dari 17 instrumen variabel penilaian *stakeholders* terhadap informasi dalam laporan audit pemerintah daerah, hampir seluruhnya telah dianggap memenuhi, dan hanya satu pernyataan yang masih dianggap netral yaitu instrumen tentang jaminan kesesuaian pendanaa dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang disahkan oleh peraturan pemerintah, undang-undang atau peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena adanya pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah yang akan membawa dampak perubahan terhadap pola dan sistem pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.
2. Dari hasil pengujian data dalam penelitian ini juga menunjukkan beberapa jenis informasi dalam laporan audit pemerintah daerah sangat penting untuk disajikan dalam laporan audit tersebut. Dalam pengujian kedua penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa perbedaan instrumen yang bersifat

penting dengan instrumen yang moderat bukan terjadi karena kebetulan semata tetapi terjadi secara signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan informasi yang dinilai penting oleh *stakeholders* untuk disajikan dalam laporan audit memang penting dan bukan menjadi penting karena suatu kebetulan yang dikarenakan sifat sampel penelitian ini.

Sementara untuk informasi tambahan yang dirasa penting oleh *stakeholders* yaitu :

1. Informasi mengenai sumber daya yang baik
2. Adanya perhitungan laporan keuangan yang jelas
3. Jaminan laporan audit yang tepat waktu
4. Jaminan tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun
5. Informasi laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## 5.2 Saran

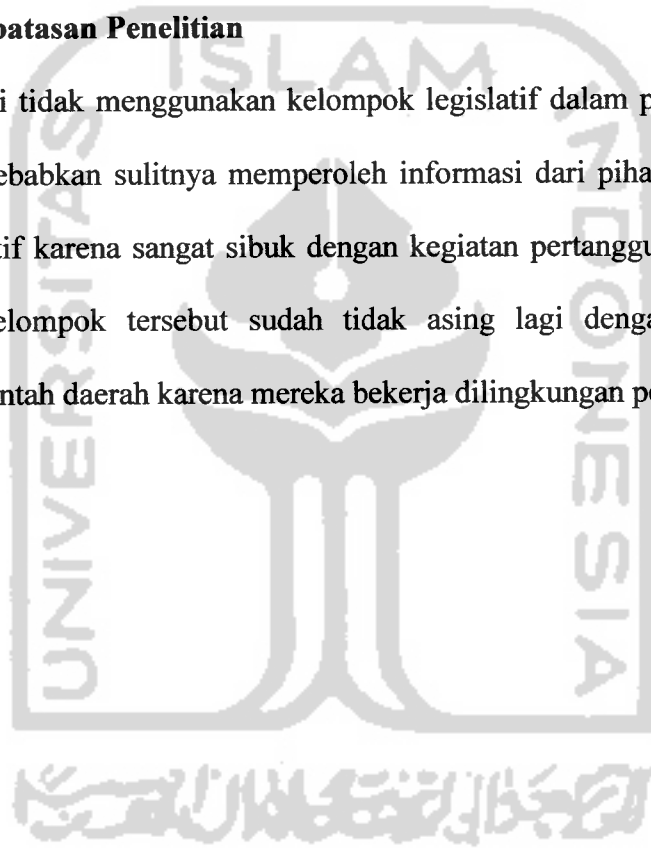
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat disarankan kepada :

1. Bagi pemerintah daerah hendaknya reformasi yang telah dilakukan dalam melakukan audit laporan keuangan oleh BPK, hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan, agar kebutuhan-kebutuhan informasi bagi *stakeholders* mampu dipenuhi, dan hal ini akan semakin mengurangi kesenjangan kepentingan antara *stakeholders* dengan pihak pemerintah daerah.
2. Pihak BPK hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk lebih menyempurnakan laporan audit atas pemerintah daerah.

3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang serupa dengan menambah jumlah sampel yang lebih besar, misalnya untuk pemerintah daerah di Pulau Jawa, sehingga diperoleh hasil yang lebih sempurna.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti tidak menggunakan kelompok legislatif dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan sulitnya memperoleh informasi dari pihak legislatif pihak legislatif karena sangat sibuk dengan kegiatan pertanggungjawaban tugas dan kelompok tersebut sudah tidak asing lagi dengan laporan audit pemerintah daerah karena mereka bekerja dilingkungan pemerintahan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dwi, Hertya (2006). *Hubungan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusi dan Kebijakan Hutang dalam Prespektif Masalah Agensi di Indonesia*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Endah, Woro. (2004). *Analisis Minat Konsumen dalam Menabung*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Gitoyo. (1996). *Persepsi Stakeholders terhadap Laporan Keuangan Auditan*. Tesis (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: UGM.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komalasari, Puput T. (1999). "Model Perencanaan Sistem Informasi Suatu Perspektif Teori Agensi". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Volume 3 No. 2. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja. (1998). *Auditing*. Buku Satu, Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Nagu, Nadhirah. (2007). *Studi Eksplorasi Persepsi Legislatif dan Eksekutif Terhadap Informasi dalam Laporan Audit Pemerintah Daerah di Propinsi Maluku Utara*. Tesis (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: UGM.
- Rosemaryati, Dina. (2004). *Pengaruh Persepsi Tentang Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Pemda Kabupaten Sleman*. Tesis (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: UGM.
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah (Kerangka, Standar dan Metode)*. Surabaya: Aksara Satu
- Setyorini, Dyah. (2003). *Evaluasi Empiris Terhadap Persepsi Pemakai atas Bentuk Laporan Audit yang Berubah*. Tesis (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: UGM.



- Sudjana, Edy. (2001). *Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pemda*. Tesis (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: UGM.
- Sugiyono. (2005). *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan ke Tujuh. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Joko. (2006). "Eksplorasi Kebutuhan Stakeholders Terhadap Informasi Dalam Laporan Audit Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Volume 10 No. 1. Yogyakarta: FE UII.
- Susilo, Joko. (2004). *Eksplorasi Kebutuhan Stakeholders Terhadap Informasi Dalam Laporan Audit Pemerintah Daerah*. Tesis (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: UGM.
- Triadji, Bambang, Dr. (2002). "Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Volume 03 No. 01. Yogyakarta: Kompartemen Akuntan Sektor Publik, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wirawati, Nevi. (2003). *Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Dimensi Kualitas Pelayanan di Hotel Santika Yogyakarta*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.



# LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283  
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 360/DEK/10/DAU/XII/2007  
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

14 Desember 2007

Kepada Yth.

.  
. .  
. .  
. .

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Riang Adistyningtyas  
No. Mahasiswa : 04 312 414  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Jl. Tambakboyo No. 34 A Condongcatur, Depok, Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : **"EKSPLOKASI KEBUTUHAN STEAKHOLDERS TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN AUDIT PEMERINTAH DAERAH"**

Dosen Pembimbing : Drs. Johan Arifin, M.Si

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

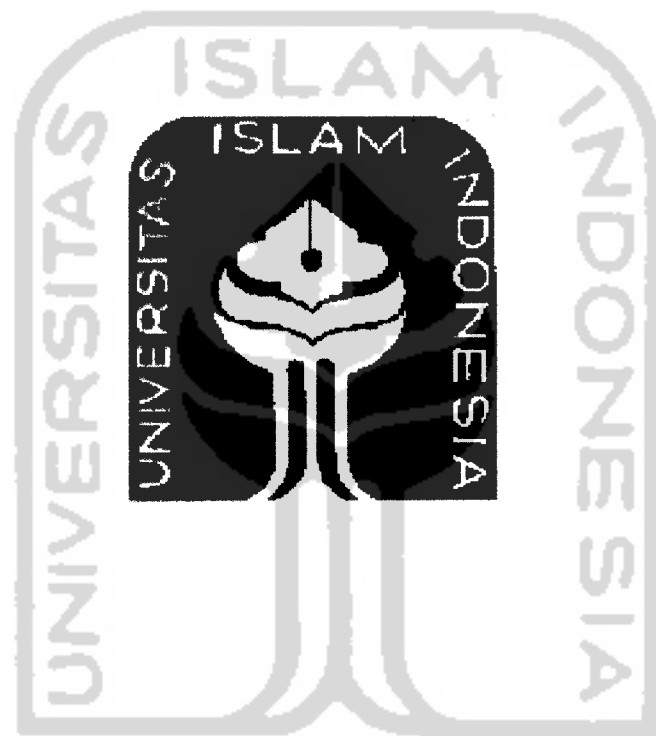
Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Dekan,

**Drs. Asma'i Ishak, M.Bus, Ph.D.**  
NIK : 84 311 0101

# **KUESIONER PENELITIAN**



**RIANG ADISTYANINGTYAS**

**PROGRAM STRATA-1  
FAKULTAS EKONOMI-AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2007**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
PROGRAM S1  
FAKULTAS EKONOMI-AKUNTANSI

---

**Hal: Permohonan Kesediaan Menjadi Responden**

**Kepada Yth.**

**Bapak/Ibu/Sdr(i)**

Di Tempat

Saya, Riang Adistyningtyas, adalah mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi-Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam rangka penelitian ilmiah (penulisan skripsi) guna menyelesaikan studi saya, maka saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk mengisi kuisisioner berikut ini.

Audit untuk sektor publik tidaklah sesederhana sebagaimana audit yang ada dalam sektor swasta. Di sektor publik dikenal berbagai macam audit seperti **audit keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit program**. Perlu diketahui sebelumnya, seiring dengan adanya tuntutan akuntabilitas publik, maka mulai tahun 2006 pemerintah daerah diharuskan melaporkan pengelolaan keuangannya yang telah diaudit oleh BPK. Namun demikian, apakah laporan audit dalam hal ini audit keuangan, sudah mencukupi tuntutan publik akan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Negara? Oleh sebab itu, penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengeksplorasi/menjajagi sejauh mana;

- (1) informasi dalam laporan audit pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu/Saudara terhadap informasi hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan
- (2) informasi-informasi apa sajakah yang Bapak/Ibu/Saudara anggap penting untuk disajikan dalam publikasi hasil audit atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan studi dan tidak untuk tujuan lain. Untuk itu, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr(i) berkenan membantu penelitian kami dengan menjawab semua pertanyaan di bawah ini pada jawaban yang telah disediakan.

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, Desember 2007

Hormat Saya,

Riang Adistyningtyas

Peneliti

**A. PERTANYAAN BERKAITAN IDENTITAS RESPONDEN**

A. Nama : ..... (Boleh Tidak Diisi)

B. Umur : .....Tahun.....Bulan

C. Domisili : Banyumas/Cilacap/Banjarnegara/Purbalingga

D. Pendidikan Terakhir :

SLTA  S1  S3

D3  S2  Lain-lain

E. Status :

Mahasiswa  Investor/Kreditor

Pegawai Swasta  Pegawai Edukatif

Organisasi Politik  LSM

Pegawai Negeri  Lain-lain; sebutkan.....

Pihak Legislatif

F. Pengalaman dengan status tersebut :

1 – 2 tahun

5 – 6 tahun

3 – 4 tahun

4 – 5 tahun

Di atas 6 tahun



Berikut ini disajikan rumusan opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan**

**Pemerintah Kabupaten INDAH PERMAI**

**TA 2003/2004**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, dan Pasal 31 UU No. 17 tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten INDAH PERMAI tahun anggaran 2003/2004 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten INDAH PERMAI. Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten INDAH PERMAI. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003/2004 berdasarkan pemeriksaan BPK-RI.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material sebagai dasar untuk memberikan pendapat.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2003/2004 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003/2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten INDAH PERMAI Tahun Anggaran 2003/2004 meliputi pengujian atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2003/2004, Neraca per tanggal 31 Maret 2004, Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2003/2004, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten INDAH PERMAI Tahun Anggaran 2003/2004, BPK-RI berpendapat bahwa *Laporan Keuangan Kabupaten INDAH PERMAI Tahun Anggaran 2003/2004 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku.*

Di dalam semua hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten INDAH PERMAI Tahun Anggaran 2003/2004, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten INDAH PERMAI dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

## B. PERTANYAAN UNTUK MENGEKSPLORASI PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP LAPORAN AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Setelah melihat laporan audit pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPK di atas, Anda dimohon memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan berkaitan dengan persepsi Anda terhadap laporan audit tersebut.

Daftar pertanyaan ini merupakan tipe pilihan, jawaban cukup dengan memberikan tanda X (silang) pada kotak jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) anggap paling mendekati persepsi Anda terhadap pertanyaan yang bersangkutan. Untuk itu, tersedia lima pilihan jawaban yaitu:

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, dan SS = Sangat Setuju.

1.	Auditor pemerintah (BPK) sudah bersikap independen dalam melakukan pemeriksaan Pemda guna terbitkan laporan auditor independen.	STS	TS	N	S	SS
2.	Laporan audit tersebut sudah memberikan penjelasan yang cukup memadai.	STS	TS	N	S	SS
3.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan kesesuaian laporan keuangan auditan Pemda dengan prinsip akuntansi berterima umum.	STS	TS	N	S	SS
4.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan kesesuaian laporan keuangan auditan Pemda dengan Standar Audit Pemerintahan.	STS	TS	N	S	SS
5.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan kesesuaian penggunaan dana publik oleh Pemda dengan peraturan yang berlaku.	STS	TS	N	S	SS
6.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar pengauditan yang berlaku.	STS	TS	N	S	SS
7.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan bahwa laporan keuangan auditan Pemda sudah wajar dan bebas dari salah saji material.	STS	TS	N	S	SS
8.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan pernyataan opini pada laporan audit benar-benar didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan.	STS	TS	N	S	SS
9.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan bahwa dalam pelaksanaan audit telah dilakukan pengujian data dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan atas struktur pengendalian intern.	STS	TS	N	S	SS
10.	Laporan audit tersebut sudah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.	STS	TS	N	S	SS
11.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan efisiensi dari program-program dalam mencapai tujuan sebagaimana yang disahkan oleh peraturan pemerintah, undang-undang atau peraturan Pemda.	STS	TS	N	S	SS



12.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan kesesuaian pendanaan untuk program-program sesuai dengan aturan yang berlaku untuknya.	STS	TS	N	S	SS
13.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan bahwa penerimaan dana dari warga sudah dikumpulkan, didepositokan dan dicatat/dihitung dengan tepat.	STS	TS	N	S	SS
14.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan bahwa Pemda telah melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya wajar	STS	TS	N	S	SS
15.	Laporan audit tersebut sudah dapat memberikan jaminan bahwa auditor dapat menemukan (jika ada) indikasi adanya kecurangan, kebohongan publik atau tindakan ilegal lain yang perlu adanya investigasi lebih lanjut.	STS	TS	N	S	SS
16.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan efektivitas dari program-program dalam mencapai tujuan sebagaimana yang disahkan oleh peraturan pemerintah, undang-undang atau peraturan Pemda.	STS	TS	N	S	SS
17.	Laporan audit tersebut sudah memberikan jaminan bahwa tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan dari Pemda, sudah memadai dan tepat atau relevan.	STS	TS	N	S	SS

**C. PERTANYAAN UNTUK MENGEKSPLORASI PERMINTAAN DAN HARAPAN RESPONDEN TERHADAP INFORMASI YANG TERSAJI DALAM LAPORAN AUDIT PEMDA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**

Berikut ini kami ingin mengeksplorasi permintaan dan harapan Anda terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit Pemda oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk itu, tersedia tiga pilihan jawaban yaitu:

**Y** = ya, **R**= Ragu-ragu, dan **T** = Tidak

1.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana publik telah diotorisasi dengan benar	Y	R	T
2.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai kesesuaian pendanaan aktivitas-aktivitas dan program-program yang dilaksanakan dengan aturan yang berlaku untuknya			
3.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai penerimaan dana dari warga yang dikumpulkan, didepositokan dan dicatat dengan tepat			
4.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai kewajaran dan kebenaran penyajian laporan keuangan audit			

5.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan jaminan bahwa auditor dapat menemukan (jika ada) indikasi adanya kecurangan, kebohongan publik atau tindakan ilegal lain yang perlu adanya investigasi lebih lanjut			
6.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai kehandalan dan ketaatan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengendalian intern dengan aturan dan kebijakan yang berlaku			
7.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai kesesuaian seluruh aktivitas pengelolaan dana publik dengan aturan yang berlaku			
8.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai aktivitas Pemda dalam mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sehat			
9.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi bahwa Pemda telah melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya wajar			
10.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai seberapa memadainya usaha Pemda dalam melindungi dan memelihara semua sumber daya negara			
11.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai usaha Pemda dalam menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya			
12.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai usaha Pemda dalam menghindari adanya pengangguran sumberdaya atau jumlah pegawai yang berlebihan			
13.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai efisiensi prosedur kerja dari Pemda			
14.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai optimalisasi penggunaan sumber daya Pemda (staf, peralatan dan fasilitas) dalam menghasilkan barang atau menyerahkan jasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta tepat waktu			
15.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai kepatuhan Pemda terhadap persyaratan perpu yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Negara			
16.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai usaha Pemda dalam kaitannya dengan sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau kehematan dan efisiensi pelaksanaan program			
17.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi bahwa Pemda telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efisiensi dan penghematan program			

18.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat atau relevan			
19.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai penentuan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan			
20.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai efektivitas program dan atau unsur program secara sendiri-sendiri			
21.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi identifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kerja yang baik dan memuaskan			
22.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait			
23.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang rendah			
24.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi mengenai identifikasi cara untuk dapat melaksanakan program dengan baik			
25.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut			
26.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi yang menilai apakah SPM sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program			
27.	Dibutuhkan informasi dalam laporan audit yang memberikan evaluasi apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program			

Selain dari informasi-informasi yang telah disebutkan di atas, menurut Anda informasi lain apa yang perlu disampaikan kepada pengguna laporan keuangan dalam laporan audit Pemda?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Terima Kasih Atas Partisipasi Anda**

REKAPITULASI DATA PENELITIAN

No	Nama	Umur	Domisili	Pendidikan Terakhir	Status	Pengalaman dgn Status tersebut	Pertanyaan Berkaitan dengan Identitas Responden																
							1	2	3	4	5	6	Persepsi Responden Thdp Laporan Audit Atas Lap Keuangan Penda										
1	Sugito Hidayat	54 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	4	2	4	2	4	4	3	4	4	2	4	4	2	4	3,353		
2	Retno Guwanti	52 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	3	2	2	2	2	3	4	3	4	4	3	2	4	4	3,176		
3	Leksono Fajar P.	25 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Swasta	1 - 2 tahun	3	3	1	3	1	4	5	1	2	1	4	2	5	3	2,824		
4	Rizky Yanuar	23 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Swasta	1 - 2 tahun	2	3	4	4	4	5	4	4	4	2	4	4	5	4	3,706		
5	Riang A.	21 tahun	Cilacap	SLTA	Mahasiswa	3 - 4 tahun	4	2	2	5	2	4	4	2	2	4	4	2	4	4	3,235		
6	Inah	43 tahun	Cilacap	SLTA	LSM	di atas 6 tahun	2	2	1	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1,824		
7	Imam Suwargo	43 tahun	Cilacap	S1	LSM	di atas 6 tahun	4	4	1	4	3	3	4	4	3	4	2	4	4	4	3,471		
8	Kusnan	47 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Edukatif	di atas 6 tahun	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4,176		
9		42 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Edukatif	di atas 6 tahun	4	4	5	4	4	3	5	4	3	4	4	4	4	4	3,882		
10	Djalal	50 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Swasta	di atas 6 tahun	4	2	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	4	4	3,529		
11	Endang	31 tahun	Cilacap	S1	LSM	5 - 6 tahun	5	4	4	3	1	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3,647		
12	Cipto	37 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	4	3	4	4	3	2	4	3	2	4	4	4	4	4	3,353		
13		34 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Edukatif	di atas 6 tahun	4	5	1	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	3,824	
14	Wasjud	49 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	2	3	4	4	2	4	2	4	3	2	4	4	4	4	3,353		
15		48 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Edukatif	di atas 6 tahun	2	4	3	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	3,529	
16	Suriyono	30 tahun	Cilacap	S2	Organisasi Politik	3 - 4 tahun	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3,824		
17		31 tahun	Cilacap	S1	Organisasi Politik	3 - 4 tahun	4	5	4	5	1	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3,706	
18	Trisno	43 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Swasta	di atas 6 tahun	1	4	2	3	3	4	3	4	2	4	1	4	4	2	2,941		
19		45 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Swasta	di atas 6 tahun	4	5	4	4	2	4	5	4	4	4	2	4	4	4	3,824		
20	Paramitza Siwi	21 tahun	Cilacap	SLTA	Mahasiswa	3 - 4 tahun	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	3,588		
21	Maizaya	18 tahun	Cilacap	SLTA	Mahasiswa	1 - 2 tahun	2	4	2	5	5	3	3	4	5	4	4	4	2	4	3,647		
22	Dika S.	20 tahun	Cilacap	SLTA	Mahasiswa	3 - 4 tahun	4	2	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4	3,294		
23	Rizki Kartika	19 tahun	Cilacap	SLTA	Mahasiswa	1 - 2 tahun	4	3	4	4	2	4	4	4	3	2	2	4	4	2	4	3,412	
24	Sri Yunaini	54 tahun	Cilacap	D3	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	5	3	4	2	2	2	4	2	4	4	4	4	2	4	3,176		
25	Sri Wahyuni	51 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	5	3	2	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3,647		
26	Darmiyati	52 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,706		
27	Faisah Widiarti	49 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	4	2	1	2	5	4	4	4	4	4	4	1	4	4	3,588		
28	Sudito	47 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	5	4	1	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	4	3,588		
29	Marsono	52 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3,176		
30	Sulhan	45 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	4	3	4	4	5	4	5	2	4	4	4	4	2	4	3,706		
31	Suhono	47 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	2	4	2	4	4	5	3	5	3	5	3	4	4	4	3,706		
32	Kadaryono	50 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	4	4	1	4	4	4	4	4	2	4	4	2	3	4	3,412		
33	Muhtori	50 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	2	2	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	3,412	
34	Dieky Indriyono	33 tahun	Cilacap	S1	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3,588	
35	Dwi Listiyono	36 tahun	Cilacap	D3	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	4	4	4	5	5	3	2	4	4	4	4	4	4	2	4	3,824	
36	Suwardi	34 tahun	Cilacap	D3	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	2	3	2	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	2	3,235	
37	Yanuar Prakoso	29 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	3 - 4 tahun	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3,588		
38	Yanuar Prambadi	29 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	3 - 4 tahun	4	4	4	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3,471	
39	Saiful Anwar	43 tahun	Cilacap	SLTA	Pegawai Negeri	di atas 6 tahun	4	2	4	4	3	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	3,471	











Eksplorasi Perhitungan dan Harapan Responder Thdp Informasi yang Tersaji dalam Laporan Audit Penda Oleh BPK																															
No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
																												Informasi Tambahan			
1	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2,7	Informasi penggunaan sumber daya dengan baik	
2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2,7		
3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9		
4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8		
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	1,9	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9		
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2,9		
9	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,9		
10	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8		
11	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2,7		
12	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,7	Adanya perhitungan laporan keuangan yang jelas	
13	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8		
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2,8		
15	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2,8		
16	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9		
17	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9		
18	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	
19	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,7	
20	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	
23	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
24	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
26	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2,8	
27	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
28	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2,8	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
30	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,8	
31	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,8	
32	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
33	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	jaminan laporan audit yang tepat waktu
35	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
37	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,9	









### Lampiran IV Data Responden

#### Frequencies

##### Statistics

		Umur	Domisili	Pendidikan terakhir	Status	Pengalaman dengan status tersebut
N	Valid	186	186	186	186	186
	Missing	0	0	0	0	0

#### Frequency Table

##### Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 30 tahun	62	33.3	33.3	33.3
	30 - 39 tahun	39	21.0	21.0	54.3
	40 - 49 tahun	52	28.0	28.0	82.3
	50 - 59 tahun	33	17.7	17.7	100.0
	Total	186	100.0	100.0	

##### Domisili

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Banjarmegara	52	28.0	28.0	28.0
	Banyumas	46	24.7	24.7	52.7
	Cilacap	59	31.7	31.7	84.4
	Purbalingga	29	15.6	15.6	100.0
	Total	186	100.0	100.0	

##### Pendidikan terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	74	39.8	39.8	39.8
	D3	23	12.4	12.4	52.2
	S1	72	38.7	38.7	90.9
	S2	17	9.1	9.1	100.0
	Total	186	100.0	100.0	

**Status**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mahasiswa	33	17.7	17.7	17.7
Pegawai Negeri	54	29.0	29.0	46.8
Pegawai Edukatif	25	13.4	13.4	60.2
Pegawai Swasta	37	19.9	19.9	80.1
LSM	21	11.3	11.3	91.4
Organisasi Politik	16	8.6	8.6	100.0
Total	186	100.0	100.0	

**Pengalaman dengan status tersebut**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 - 2 tahun	19	10.2	10.2	10.2
3 - 4 tahun	43	23.1	23.1	33.3
5 - 6 tahun	7	3.8	3.8	37.1
5 - 6 tahun	12	6.5	6.5	43.5
> 6 tahun	105	56.5	56.5	100.0
Total	186	100.0	100.0	

**Lampiran V**  
**Hasil Uji Validitas**

**Uji Validitas Persepsi Stakeholders**

**Correlations**

**Correlations**

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	TOTX
X1	Pearson Correlation	1	.170*	.157*	.075	.098	-.054	.208**	.048	.367**
	Sig. (2-tailed)	.	.020	.033	.312	.185	.464	.004	.517	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X2	Pearson Correlation	.170*	1	.105	.171*	.006	-.008	.042	-.015	.313**
	Sig. (2-tailed)	.020	.	.153	.020	.940	.914	.567	.841	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X3	Pearson Correlation	.157*	.105	1	.059	.061	-.035	.039	.102	.386**
	Sig. (2-tailed)	.033	.153	.	.424	.408	.634	.598	.164	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X4	Pearson Correlation	.075	.171*	.059	1	.091	.081	.080	.000	.425**
	Sig. (2-tailed)	.312	.020	.424	.	.217	.273	.278	.995	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X5	Pearson Correlation	.098	.006	.061	.091	1	-.061	.130	.073	.372**
	Sig. (2-tailed)	.185	.940	.408	.217	.	.411	.078	.322	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X6	Pearson Correlation	-.054	-.008	-.035	.081	-.061	1	-.026	.141	.323**
	Sig. (2-tailed)	.464	.914	.634	.273	.411	.	.728	.055	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X7	Pearson Correlation	.208**	.042	.039	.080	.130	-.026	1	.030	.374**
	Sig. (2-tailed)	.004	.567	.598	.278	.078	.728	.	.684	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X8	Pearson Correlation	.048	-.015	.102	.000	.073	.141	.030	1	.353**
	Sig. (2-tailed)	.517	.841	.164	.995	.322	.055	.684	.	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186
TOTX	Pearson Correlation	.367**	.313**	.386**	.425**	.372**	.323**	.374**	.353**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



**Uji Validitas Persepsi Stakeholders (Lanjutan)**  
**Correlations**

**Correlations**

	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	TOTX
X9 Pearson Correlation	1	.188*	.064	.044	.009	.193**	.130	.150*	.064	.432**
X9 Sig. (2-tailed)	.	.010	.389	.548	.905	.008	.076	.041	.384	.000
X9 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X10 Pearson Correlation	.188*	1	.225**	.002	.152*	.237**	.205**	.124	.027	.509**
X10 Sig. (2-tailed)	.010	.	.002	.977	.039	.001	.005	.091	.711	.000
X10 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X11 Pearson Correlation	.064	.225**	1	-.019	.062	.192**	.122	.036	.133	.418**
X11 Sig. (2-tailed)	.389	.002	.	.796	.403	.009	.096	.624	.070	.000
X11 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X12 Pearson Correlation	.044	.002	-.019	1	-.175*	-.005	.039	.101	.010	.324**
X12 Sig. (2-tailed)	.548	.977	.796	.	.017	.951	.598	.170	.889	.000
X12 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X13 Pearson Correlation	.009	.152*	.062	-.175*	1	.219**	.113	.019	-.010	.279**
X13 Sig. (2-tailed)	.905	.039	.403	.017	.	.003	.124	.794	.891	.000
X13 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X14 Pearson Correlation	.193**	.237**	.192**	-.005	.219**	1	.188*	.089	.072	.447**
X14 Sig. (2-tailed)	.008	.001	.009	.951	.003	.	.010	.228	.329	.000
X14 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X15 Pearson Correlation	.130	.205**	.122	.039	.113	.188*	1	-.001	.072	.375**
X15 Sig. (2-tailed)	.076	.005	.096	.598	.124	.010	.	.987	.328	.000
X15 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X16 Pearson Correlation	.150*	.124	.036	.101	.019	.089	-.001	1	.015	.374**
X16 Sig. (2-tailed)	.041	.091	.624	.170	.794	.228	.987	.	.839	.000
X16 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
X17 Pearson Correlation	.064	.027	.133	.010	-.010	.072	.072	.015	1	.293**
X17 Sig. (2-tailed)	.384	.711	.070	.889	.891	.329	.328	.839	.	.000
X17 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
TOTX Pearson Correlation	.432**	.509**	.418**	.324**	.279**	.447**	.375**	.374**	.293**	1
TOTX Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
TOTX N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Uji Validitas Kebutuhan *Stakeholders*

### Correlations

#### Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	TOTY
Y1	Pearson Correlation	1	.075	.262**	.248**	.406**	.253**	.301**	.131	.199**	.604**
	Sig. (2-tailed)	.	.307	.000	.001	.000	.000	.000	.076	.006	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y2	Pearson Correlation	.075	1	.027	.102	.018	.008	.166*	.004	.268**	.297**
	Sig. (2-tailed)	.307	.	.718	.167	.812	.914	.024	.960	.000	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y3	Pearson Correlation	.262**	.027	1	.096	.226**	.337**	.216**	.057	.124	.464**
	Sig. (2-tailed)	.000	.718	.	.193	.002	.000	.003	.438	.092	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y4	Pearson Correlation	.248**	.102	.096	1	.322**	.164*	.210**	.127	.296**	.507**
	Sig. (2-tailed)	.001	.167	.193	.	.000	.025	.004	.083	.000	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y5	Pearson Correlation	.406**	.018	.226**	.322**	1	.199**	.238**	.191**	.107	.569**
	Sig. (2-tailed)	.000	.812	.002	.000	.	.006	.001	.009	.146	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y6	Pearson Correlation	.253**	.008	.337**	.164*	.199**	1	.199**	.110	.003	.424**
	Sig. (2-tailed)	.000	.914	.000	.025	.006	.	.006	.136	.964	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y7	Pearson Correlation	.301**	.166*	.216**	.210**	.238**	.199**	1	.080	.307**	.511**
	Sig. (2-tailed)	.000	.024	.003	.004	.001	.006	.	.276	.000	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y8	Pearson Correlation	.131	.004	.057	.127	.191**	.110	.080	1	.031	.296**
	Sig. (2-tailed)	.076	.960	.438	.083	.009	.136	.276	.	.678	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y9	Pearson Correlation	.199**	.268**	.124	.296**	.107	.003	.307**	.031	1	.458**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.092	.000	.146	.964	.000	.678	.	.000
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
TOTY	Pearson Correlation	.604**	.297**	.464**	.507**	.569**	.424**	.511**	.296**	.458**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Uji Validitas Kebutuhan Stakeholders (Lanjutan)**  
**Correlations**

Correlations

	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	TOTY
Y10 Pearson Correlation	1	.147*	.135	.210**	.145*	.138	.088	.167*	.054	.309**
Y10 Sig. (2-tailed)	.	.046	.067	.004	.048	.060	.233	.023	.468	.000
Y10 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y11 Pearson Correlation	.147*	1	.275**	.351**	.068	.216**	.196**	.241**	.080	.470**
Y11 Sig. (2-tailed)	.046	.	.000	.000	.354	.003	.007	.001	.281	.000
Y11 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y12 Pearson Correlation	.135	.275**	1	.374**	.122	.217**	.279**	.249**	.153*	.499**
Y12 Sig. (2-tailed)	.067	.000	.	.000	.097	.003	.000	.001	.037	.000
Y12 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y13 Pearson Correlation	.210**	.351**	.374**	1	.350**	.488**	.358**	.522**	.311**	.782**
Y13 Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y13 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y14 Pearson Correlation	.145*	.068	.122	.350**	1	.164*	.088	.157*	.172*	.412**
Y14 Sig. (2-tailed)	.048	.354	.097	.000	.	.025	.233	.032	.019	.000
Y14 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y15 Pearson Correlation	.138	.216**	.217**	.488**	.164*	1	.339**	.465**	.164*	.575**
Y15 Sig. (2-tailed)	.060	.003	.003	.000	.025	.	.000	.000	.025	.000
Y15 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y16 Pearson Correlation	.088	.196**	.279**	.358**	.088	.339**	1	.244**	.141	.483**
Y16 Sig. (2-tailed)	.233	.007	.000	.000	.233	.000	.	.001	.054	.000
Y16 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y17 Pearson Correlation	.167*	.241**	.249**	.522**	.157*	.465**	.244**	1	.234**	.567**
Y17 Sig. (2-tailed)	.023	.001	.001	.000	.032	.000	.001	.	.001	.000
Y17 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y18 Pearson Correlation	.054	.080	.153*	.311**	.172*	.164*	.141	.234**	1	.408**
Y18 Sig. (2-tailed)	.468	.281	.037	.000	.019	.025	.054	.001	.	.000
Y18 N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
TOTY Pearson Correlation	.309**	.470**	.499**	.782**	.412**	.575**	.483**	.567**	.408**	1
TOTY Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
TOTY N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Uji Validitas Kebutuhan Stakeholders (Lanjutan)**  
**Correlations**

**Correlations**

	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y26	Y27	TOTY
Y19 Pearson Correlation	1	.217**	.415**	.394**	.270**	.114	.303**	.403**	.234**	.636**
Sig. (2-tailed)	.	.003	.000	.000	.000	.121	.000	.000	.001	.000
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y20 Pearson Correlation	.217**	1	.249**	.237**	.178*	.013	.112	.256**	.302**	.423**
Sig. (2-tailed)	.003	.	.001	.001	.015	.865	.127	.000	.000	.000
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y21 Pearson Correlation	.415**	.249**	1	.402**	.188*	.104	.269**	.414**	.323**	.626**
Sig. (2-tailed)	.000	.001	.	.000	.010	.158	.000	.000	.000	.000
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y22 Pearson Correlation	.394**	.237**	.402**	1	.217**	-.003	.181*	.394**	.256**	.610**
Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.	.003	.964	.013	.000	.000	.000
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y23 Pearson Correlation	.270**	.178*	.188*	.217**	1	.136	.369**	.156*	.231**	.411**
Sig. (2-tailed)	.000	.015	.010	.003	.	.064	.000	.033	.002	.000
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y24 Pearson Correlation	.114	.013	.104	-.003	.136	1	.061	.095	.210**	.304**
Sig. (2-tailed)	.121	.865	.158	.964	.064	.	.412	.199	.004	.000
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y25 Pearson Correlation	.303**	.112	.269**	.181*	.369**	.061	1	.154*	.231**	.441**
Sig. (2-tailed)	.000	.127	.000	.013	.000	.412	.	.036	.002	.000
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y26 Pearson Correlation	.403**	.256**	.414**	.394**	.156*	.095	.154*	1	.325**	.547**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.033	.199	.036	.	.000	.000
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Y27 Pearson Correlation	.234**	.302**	.323**	.256**	.231**	.210**	.231**	.325**	1	.517**
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.002	.004	.002	.000	.	.000
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
TOTY Pearson Correlation	.636**	.423**	.626**	.610**	.411**	.304**	.441**	.547**	.517**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran VI Hasil Uji Reliabilitas

### Reliability Persepsi *Stakeholders*

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	186	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	186	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.603	17

### Reliability Kebutuhan *Stakeholders*

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	186	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	186	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.846	27

### Lampiran VII Hasil Uji Correlations

#### Correlations

		Persepsi Stakeholders	Kebutuhan Stakeholders
Persepsi Stakeholders	Pearson Correlation	1	.481**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	186	186
Kebutuhan Stakeholders	Pearson Correlation	.481**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	186	186

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Nonparametric Correlations

#### Correlations

			Persepsi Stakeholders	Kebutuhan Stakeholders
Kendall's tau_b	Persepsi Stakeholders	Correlation Coefficient	1.000	.162**
		Sig. (2-tailed)	.	.002
		N	186	186
	Kebutuhan Stakeholders	Correlation Coefficient	.162**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.002	.
		N	186	186
Spearman's rho	Persepsi Stakeholders	Correlation Coefficient	1.000	.219**
		Sig. (2-tailed)	.	.003
		N	186	186
	Kebutuhan Stakeholders	Correlation Coefficient	.219**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.003	.
		N	186	186

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Lampiran VIII**  
**Hasil Uji Binomial**

**NPar Tests**

**Binomial Test**

		Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
Peringkat Informasi	Group 1	> 2,5	25	.93	.50	.000 <sup>a</sup>
	Group 2	<= 2,5	2	.07		
	Total		27	1.00		

a. Based on Z Approximation.

